

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Hubungan Antara Dokumen.....	5
1.4 Maksud dan Tujuan	9
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	10
TujaTujuan.....	
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH	14
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	14
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Realisasi.....	41
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	163
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	177
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	177
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	189
BAB IV SASARAN PRIORITAS DAN PEMBANGUNAN DAERAH	199
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	199
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019 ...	211
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	219
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	240
BAB VII PENUTUP	254
 LAMPIRAN	
Lampiran Bab VI.....	iii

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMORTAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2022**



**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
TAHUN 2022
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dokumen ini memuat rancangan kerja ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut:

- A. Pendekatan Perencanaan yang berorientasi pada Proses, yang meliputi :
 1. Pendekatan Politik yaitu penjabaran dari agenda-agenda pembangunan;
 2. Pendekatan Teknokratik yaitu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah;
 3. Pendekatan Partisipatif yaitu pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan;
 4. Pendekatan Top Down dan Bottom Up yaitu pendekatan yang diselaraskan melalui musyawarah Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- B. Pendekatan Perencanaan yang berorientasi pada Substansi, yang meliputi :
 1. Pendekatan Holistik/Tematik yaitu pendekatan yang mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan permasalahan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya;
 2. Pendekatan Integratif yaitu pendekatan yang menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu

proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;

3. Pendekatan Spasial yaitu pendekatan yang mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Disamping itu juga dilakukan proses-proses perencanaan yang bersifat teknis melalui aplikasi e-planning. Dengan demikian melalui perencanaan yang sistematis, terencana dan bertahap sebagaimana disebutkan diatas, diharapkan dapat tersusun RKPD yang mampu mengakomodasi seluruh aspirasi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan kewenangan di masing-masing tingkatan pemerintahan. Melalui perencanaan yang baik maka seluruh indikator capaian pembangunan dapat ditetapkan dan merupakan bagian penting dalam melakukan evaluasi terhadap capaian-capaian pembangunan.

Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua stakeholders menjadi pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam proses penyusunan. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini dapat diakses oleh semua stakeholders baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hokum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri no. 13 tahun 2006
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan payung hukum bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan negara, yang digunakan sebagai arahan didalam Sistem Perencanaan Pembangunan secara nasional. Menurut undang-undang tersebut, rencana pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam konteks hubungan antar dokumen dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 ini beberapa Dokumen Perencanaan yang berhubungan satu sama lain yaitu: RPJPD Kabupaten Kolaka Timur, RTRW Kabupaten Kolaka Timur, rancangan RPJMD Kabupaten Kolaka Timur, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara, RKP Nasional; rancangan Renstra OPD Kabupaten Kolaka Timur dan Renja OPD Kabupaten Kolaka Timur.

RKPD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 merupakan penjabaran dari rancangan RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 yang merupakan

dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD, yang terdiri dari RKPD, kebijakan umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA OPD). Oleh karena itu penyusunan RKPD merupakan prasyarat APBD berbasis kinerja.

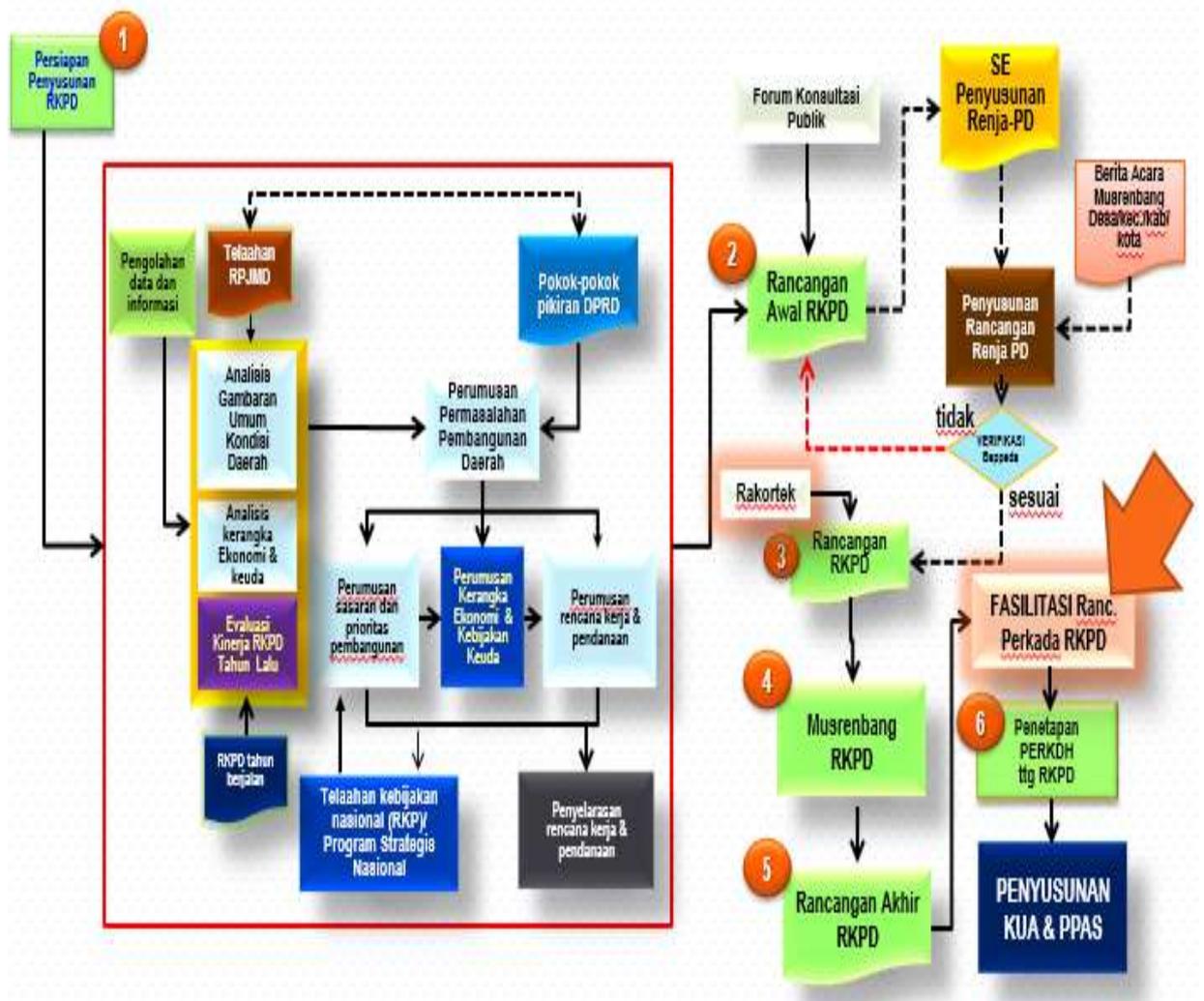
Dokumen RPJMD dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Rancangan RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi misi RPJPD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2005-2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Kolaka Timur. RPJMD Kabupaten Kolaka Timur ini merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Kolaka Timur, dan RKPD Kabupaten Kolaka Timur.

Seluruh Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah, harus mengacu, memperhatikan dan selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pemerintah Provinsi dan Pusat. RKPD Kabupaten Kolaka Timur yang disusun diselaraskan dengan dokumen RKPD Provinsi dan RKP dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Keserasian yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan secara Nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan Daerah, Nasional dan global. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi, dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan perencanaan pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah, baik dalam skala lokal RTRW Kabupaten, skala wilayah RTRW Provinsi dan skala Nasional RTRW Nasional. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, bermanfaat

secara maksimal dan berkesinambungan di setiap wilayah pembangunan.

Gambar 1.1
Alur Proses Penyusunan Dokumen RKPD



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Penyusunan RKPD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2022.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 adalah :

- a. Menjelaskan secara umum tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022;
- b. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kolaka Timur tahun 2022.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 terdiri dari 7 (tujuh) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD sasaran penyusunan dokumen RKPD.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Pada bagian ini memberikan data dan informasi yang menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Bagian ini akan memberikan data dan informasi serta telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Menjelaskan permasalahan daerah yang dianggap memiliki nilai prioritas.

2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bagian ini akan memberikan informasi hasil telaah kondisi dan analisis data statistik perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan serta tantangan dan prospek perekonomian yang mungkin akan dihadapi pada tahun 2021 dan 2022.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Bagian ini akan memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2022 yang merupakan bagian dari pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran pembangunan yang termuat dalam

rancangan RPJMD Kabupaten Kolaka Timur 2021-2026.

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas pembangunan adalah prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini akan memuat rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2022 beserta kerangka pendanaannya.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Memuat kesimpulan dan harapan dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Kondisi Geografi dan Demografi

A. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Kolaka Timur terletak di daratan Tenggara Pulau Sulawesi, dengan ibukota Kabupaten berkedudukan di Kecamatan Tirawuta. Seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Timur merupakan Daratan, dengan luas 3.634,74 km² (*berdasarkan UU Nomor 08 Tahun 2013*) dan luas 3.991,78 km² (*berdasarkan Perda No.78 RTRW Kolaka Timur Tahun 2020-2040*). Secara administrasi Kabupaten Kolaka Timur terdiri atas dua belas wilayah kecamatan, yaitu Ladongi, Lambandia, Tirawuta, Mowewe, Uluiwoi, Tinondo, Lalolae, Poli-Polia, Loea, Aere, Dangia, dan Ueesi.

Kabupaten Kolaka Timur secara geografis terletak dibagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara, memanjang dari Utara ke Selatan diantara 3°00'-4°30' Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 121°45'-124°06' Bujur Timur.

Secara administrasi Kabupaten Kolaka Timur terdiri 12 wilayah Kecamatan, 16 wilayah Kelurahan, 117 Desa yakni sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Tirawuta sebagai Ibu Kota Kabupaten Kolaka Timur terdiri dari 2 (dua) kelurahan yakni Kelurahan Rate – Rate. Kelurahan Tababu dan 14 (empat belas) desa yakni Tawainalu. Lara. Simbune. Lalingato. Tirawuta. Tumbudadio. Poni Poniki. Tasahea. Orawa. Woiha. Roko Roko. Loka. Karemotingge. Matabondu dan Kelurahan Rate-rate;

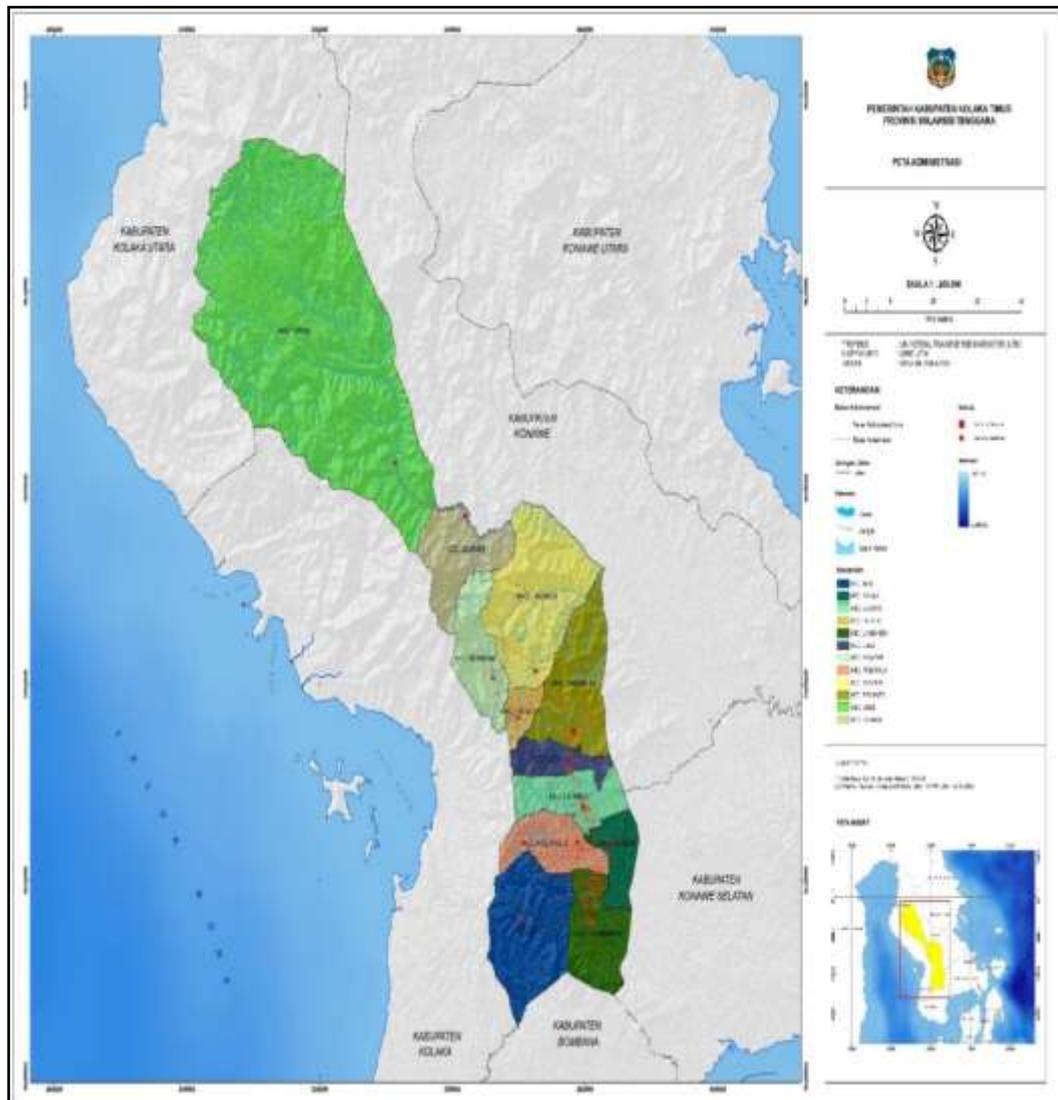
- 2) Kecamatan Mowewe memiliki 3 (tiga) kelurahan dan 5 (lima) desa, yakni Kelurahan Horodopi, Inebengi, Woitombo, Desa Ulu Mowewe, Nelombu, Puuosu, Watupute, Lapangisi, Sabi - Sabila, Lambotuo;
- 3) Kecamatan Lalolae terdiri dari Kelurahan Lalolae dan 4 (empat) desa, yakni Keisio, Talodo, Wesalo, dan Lalosingi;
- 4) Kecamatan Tinondo memiliki 11 (Sebelas) desa dan 1 (satu) kelurahan, yakni Ambapa, Tinondo, Solewatu, Ameroro, Tawarombadaka, Lamunde, Talata, Weamo, Tawa Tawaro, Woimea, Tutuwi, Singgere;
- 5) Kecamatan Loea terdiri dari 2 (dua) kelurahan Simbalai dan Loea serta 7 (tujuh) desa, yakni Lamoare, Iwoikondo, Peatoa, Mataiwoi, Teposua, Lalowura, Tinomu;
- 6) Kecamatan Ladongi terdiri 4 (empat) Kelurahan Atula, Ladongi, Welala, Raraa dari 9 (sembilan) desa, yakni Wunggoloko, Lalowosula, Putemata, Anggaloosi, Pombeyoha, Tongandiu;
- 7) Kecamatan Dangia terdiri dari 12 (dua belas) desa yakni Dangia, Lembah Subur, Gunung Jaya, Wande, Talinduka, Tetembuta, Mekar Jaya, Mulia Jaya, Tetewua, Anambada, Lamosila, Lalokateba;
- 8) Kecamatan Poli Polia terdiri dari 1 (satu) Kelurahan Poli-Polia, 11 (sebelas) desa yakni Wia Wia, Tokai, Pangi Pangi, Andowengga, Polenga Jaya, Polemaju Jaya, Toasu, Wundubite, Hakambololi, Puundokulo, Inotu Mewao;
- 9) Kecamatan Lambandia terdiri dari 1 (satu) Kelurahan Penanggo Jaya serta 19 (sembilan belas) desa, yakni Wonuambuteo, Lowa, Penanggoosi, Mokupa, Atolanu, Bou, Lambandia, Lere Jaya, Lalolera, Pomburea, Inotu, Mondeke, Onemanu, Penanggotu;

- 10) Kecamatan Aere terdiri dari 11 (sebelas) desa yakni, Aere, Aladadio, Iwoimenggura, Iwoimea Jaya, Taore, Awiu, Pekorea, Tinete, Ulundoro, Rubia, Watuoha;
- 11) Kecamatan Uluiwoi terdiri dari 1 (satu) Kelurahan Sanggona dan 12 (dua belas) desa yakni, Tawanga, Undolo, Tondowatu, Uete, Pehanggo, Lalombai, Amokuni, Amolulu, Aukora; dan Kecamatan Ueesi terdiri dari 11 (sebelas) desa yakni Liku Walanapo, Porabua, Ueesi, Ahilulu, Wesinggote, Alaaha, Watumendonga, Konawendepiha, Silui, Tongauna, Puurau.
- 12) Kecamatan Ueesi terdiri dari 11 (sebelas) Desa yaitu ; Ueesi, Wesinggote, Konawendepiha, Porabua, Silui, Watumendonga, Ahilulu, Alaha, Likuwalanapo, Tongauna, Puurau.

Batas administrasi wilayah Kabupaten Kolaka Timur berbatasan dengan ;

- Sebelah Utara : Kab. Kolaka Utara,
- Sebelah Selatan : Kab. Bombana,
- Sebelah Timur : Kab. Konawe dan Konawe Selatan,
- Sebelah Barat : Kab. Kolaka dan Kolaka Utara.

Gambar 2-1. Peta Administratif Kabupaten Kolaka Timur



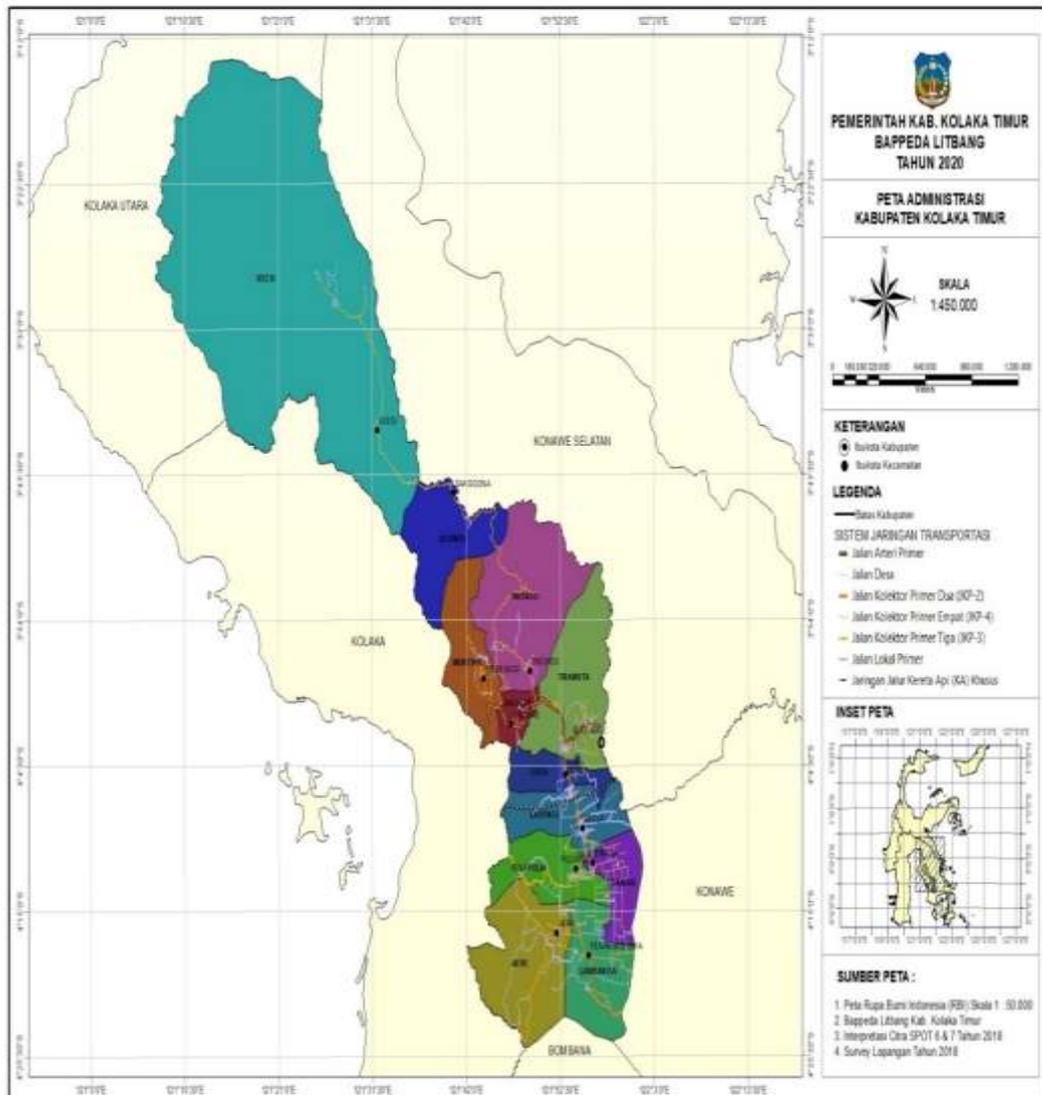
Sumber : UU. Nomor 8 Tahun 2013

Tabel 2-1. Luas Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Menurut

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah ± (Km ²)	Ibu Kota Kecamatan
1	Ladongi	122,88	Atula
2	Lambandia	133,00	PenanggoJaya
3	Tirawuta	206,80	Rate-Rate
4	Mowewe	155,29	Inebenggi
5	Uluwoi	712,39	Sanggona
6	Tinondo	261,13	Tinondo
7	Lalolae	75,39	Lalolae
8	Poli – Polia	133,53	Poli-Polia
9	Aere	138,35	Aere
10	Dangia	172,72	Dangia
11	Loea	107,94	Loea
12	Ueesi	1.435,32	Ueesi
Kolaka Timur		3.654,74	

Sumber : UU. Nomor 8 Tahun 2013, Perda Kolaka dan Hasil Perhitungan

Gambar 2-2. Peta Administrasi Kabupaten Kolaka Timur



Sumber: Perda No.78 tentang RTRW Kab. Kolaka Timur Tahun 2020-2040

Tabel 2-2. Luas Wilayah Kab. Kolaka Timur Menurut Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah ± (Km ²)	Ibu Kota Kecamatan
1	Ladongi	165,59	Atula
2	Lambandia	194,85	Penanggo Jaya
3	Tirawuta	290,11	Rate-Rate
4	Mowewe	176,72	Inebenggi
5	Uluiwoi	212,79	Sanggona
6	Tinondo	374,83	Tinondo
7	Lalolae	49,16	Lalolae
8	Poli – Polia	156,99	Poli-Polia
9	Aere	304,20	Aere
10	Dangia	105,28	Dangia
11	Loea	91,76	Loea
12	Ueesi	1869,51	Ueesi
Kolaka Timur		3.991,79	

Sumber: Perda No.78 tentang RTRW Kab. Kolaka Timur Tahun 2020-2040

Peta topografi menunjukkan bahwa Kolaka Timur umumnya memiliki permukaan tanah yang bergunung, bergelombang berbukit. Diantara gunung dan bukit-bukit. Terbentang dataran yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Dengan tingkat kemiringan lahan diklasifikasikan dalam empat kelas lereng yaitu 0 – 8%, 8 –25%, 25% –40% dan lebih dari 40 %. Kemiringan tanah yang paling dominan adalah di atas 40% meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Kolaka Timur dengan luas 510.976 ha atau 74%. Sedangkan daerah datar dengan kemiringan 0 % - 8% menempati areal seluas 90.545 ha atau 13%. Daerah dengan kelerengan 8 – 25% dan 25 – 40% masing-masing menempati 6% dari luas Kabupaten Kolaka Timur.

Dari jenis tanah, Kabupaten Kolaka Timur memiliki sedikitnya tujuh jenis tanah, yaitu tanah Podzolik Merah Kuning seluas 167.235ha (24,17 persen dari luas tanah Kolaka Timur), Podzolik Cokelat Kelabu 103.780 ha (15,00 persen), Lithosol 131.145 ha (18,96 persen), Regosol 40.193 ha (5,81 persen), Alluvial 54.695 ha (7,91 persen), Rezina 67.271(9,72 persen), Mediteran Merah Kuning 127.519 (18,43 persen).

Kabupaten Kolaka Timur memiliki Prasarana sumber daya air adalah prasarana pengembangan sumber daya air untuk memenuhi berbagai kepentingan, utamanya untuk air bersih dan air irigasi. Pengembangan prasarana sumber daya air di arahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan, sumber air tanah dan sumber mata air. Pengembangan sistem irigasi dalam rangka peningkatan pelayanan irigasi diarahkan pada pengelolaan DAS yang terdapat diwilayah Kabupaten Kolaka Timur adalah DAS Konaweha. Kabupaten Kolaka Timur memiliki beberapa sungai-sungai kecil yang tersebar pada beberapa kecamatan. Sungai tersebut pada umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga, kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan irigasi serta pariwisata. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Kolaka Timur.

Curah hujan dipengaruhi oleh perbedaan iklim, orografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Hal ini menimbulkan adanya perbedaan curah hujan menurut bulan. Jumlah curah hujan di wilayah Kabupaten Kolaka Timur adalah 1.593,3 mm/tahun dengan jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 264,4 mm dan jumlah curah hujan terendah terjadi pada bulan November sebesar 0,4 mm. Sedangkan jumlah hari hujan di wilayah Kabupaten Kolaka Timur adalah 174 hari dengan jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan April sebanyak 26 hari

hujan dan jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan september dan November sebanyak 4 hari hujan keadaan curah hujan dan hari hujan di wilayah Kabupaten Kolaka Timur selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2-3. Keadaan Curah Hujan dan Hari Hujan
Kab. Kolaka Timur

No.	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)
1.	Januari	152,0	18
2.	Februari	231,0	13
3.	Maret	154,5	24
4.	April	263,9	26
5.	Mei	209,1	16
6.	Juni	264,4	18
7.	Juli	45,2	13
8.	Agustus	54,4	10
9.	September	6,5	4
10.	Oktober	74,7	11
11.	November	0,4	4
12.	Desember	137,2	17
Jumlah		1.593,3	174

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur, 2020

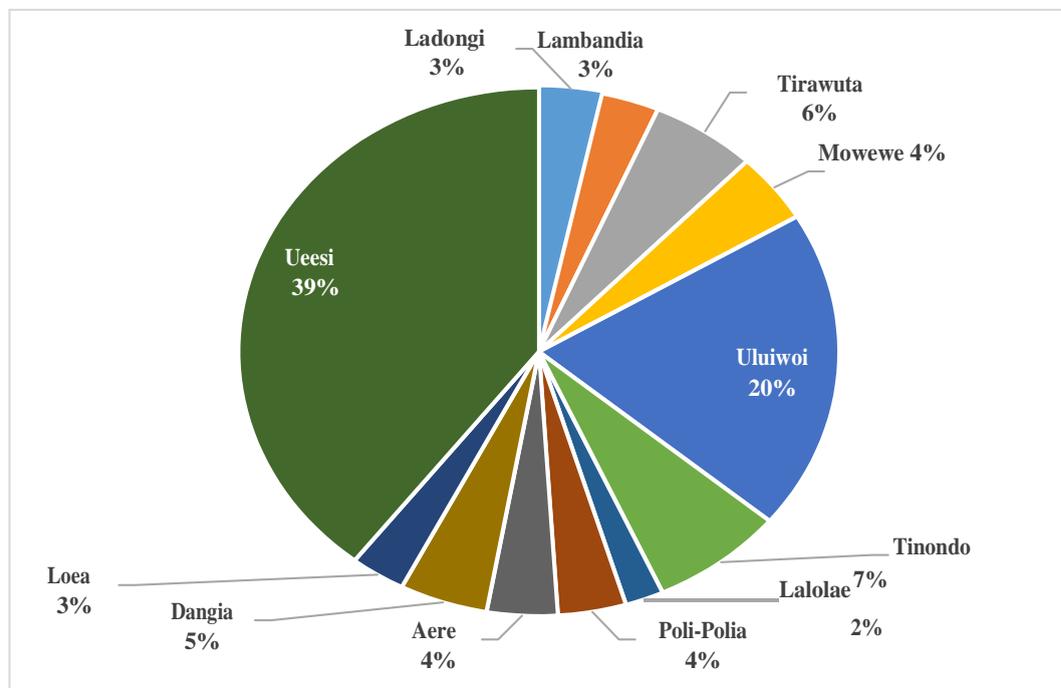
Suhu udara di wilayah Kabupaten Kolaka Timur berkisar antara 27,3-29,9°C. Suhu udara tertinggi terjadi pada bulan November yaitu 29,9°C dan suhu udara terendah terjadi pada bulan Juni yaitu 27,3°C. Kelembaban udara di wilayah Kabupaten Kolaka Timur berkisar antara 66-83%. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 83% dan kelembaban udara terendah terjadi pada bulan September sebesar 66%. Suhu udara dan kelembaban udara di wilayah Kabupaten Kolaka Timur selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2-4. Keadaan Suhu dan Kelembaban kab. Kolaka Timur

No.	Bulan	Suhu Udara (°C)	Kelembaban Udara (%)
1.	Januari	28,6	79
2.	Februari	28,0	81
3.	Maret	28,3	81
4.	April	27,9	83
5.	Mei	28,0	81
6.	Juni	27,3	80
7.	Juli	26,9	73
8.	Agustus	27,7	67
9.	September	28,3	66
10.	Oktober	29,1	69
11.	November	29,9	70
12.	Desember	29,1	78

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur, 2020

Gambar 2-3. Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019



Sumber : Kolaka Timur Dalam Angka. Tahun 2020

Tabel 2-5. Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan
di Kabupaten Kolaka Timur, 2019

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Kabupaten (km)
(1)	(2)	(3)
Aere	Aere	34,5
Lambandia	Penanggo Jaya	34,5
Poli-Polia	Poli-Polia	21,5
Dangia	Dangia	20,5
Ladongi	Atula	15,5
Loea	Loea	5,5
Tirawuta	Rate-Rate	0
Lalolae	Lalolae	24,5
Mowewe	Inebenggi	38,0
Tinondo	Tinondo	21,5
Uluiwoi	Sanggon	94,5
Ueesi	Ueesi	107,7

Sumber : Kolaka Timur Dalam Angka. Tahun 2020

B. Kondisi Demografis

Tingginya jumlah penduduk pada setiap Kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur dapat dipengaruhi oleh adanya kelahiran yang merupakan salah satu dampak dari pembangunan berbagai macam fasilitas perkantoran pemerintah maupun swasta di daerah tersebut. Fasilitas merupakan daya tarik penduduk untuk datang dan tinggal, sehingga terjadi imigrasi penduduk baik yang datang dari daerah di luar Kabupaten maupun penduduk dari desa-desa di kecamatan sekitar. Penduduk melakukan berbagai aktivitas seperti mencari pekerjaan di kantor-kantor pemerintah, swasta, sebagai buruh bangunan ataupun melakukan transaksi barang dan jasa di pasar seperti berdagang/ berjual beli barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Kolaka Timur selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2-6.

Tabel 2-6. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kab. Kolaka Timur

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ladongi	122,88	18.223	148
2.	Lambandia	113,00	19.811	175
3.	Tirawuta	206,80	17.437	84
4.	Mowewe	155,29	8.912	57
5.	Uluiwoi	712,39	5.454	8
6.	Tinondo	261,13	9.316	36
7.	Lalolae	75,39	4.628	61
8.	Poli-Polia	133,53	11.448	86
9.	Aere	138,35	8.591	62
10.	Dangia	172,72	8.901	52
11.	Loea	107,94	7.303	68
12.	Ueesi	1.435,32	4.175	3
Jumlah		3.654,74	124.199	34
Hasil Proyeksi			133.324	37

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur, 2020

Berdasarkan data statistik tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka Timur sebesar 124.199 jiwa, dengan tingkat kepadatan yaitu 34 jiwa/Km². Jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka Timur sebagian besar menyebar secara merata. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Lambandia sebanyak 19.811 jiwa dari total penduduk Kabupaten Kolaka Timur dengan tingkat kepadatan mencapai 175 jiwa/km². Jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Ueesi dengan jumlah penduduk 4.175 dari total jumlah penduduk Kabupaten Kolaka Timur dengan tingkat kepadatan mencapai 3 jiwa/Km².

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Lambandia yaitu 19.811 jiwa terdiri dari 10.197 jiwa laki-laki dan 9.614 jiwa perempuan. Sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Ueesi yaitu 4.175 terdiri dari 2.240 jiwa laki-laki dan 1.935 jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kecamatan Aere yaitu 119 dan rasio jenis kelamin terendah terdapat di Kecamatan Mowewe yaitu 101. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin di Kabupaten Kolaka Timur selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2-7. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Ladongi	9.248	8.975	18.223	103
2.	Lambandia	10.197	9.614	19.811	106
3.	Tirawuta	8.840	8.597	17.437	103
4.	Mowewe	4.476	4.436	8.912	101
5.	Uluwoi	2.806	2.648	5.454	106
6.	Tinondo	4.835	4.481	9.316	108
7.	Lalolae	2.391	2.237	4.628	107
8.	Poli-Polia	5.924	5.524	11.448	107
9.	Aere	4.478	4.113	8.591	119
10.	Dangia	4.565	4.336	8.901	105
11.	Loea	3.730	3.573	7.303	104
12.	Ueesi	2.240	1.935	4.175	116
Jumlah		63.730	60.469	124.199	105

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Timur, 2020

Tabel 2-8. Prosentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur, 2019

Kecamatan	Luas Area	Penduduk	Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)
Aere	138,35	6,92	62
Lambandia	133	15,95	175
Poli-Polia	133,53	9,22	86
Dangia	172,72	7,17	52
Ladongi	122,88	14,67	148
Loea	107,94	5,88	68
Tirawuta	206,8	14,04	84
Lalolae	75,39	3,73	61
Mowewe	155,29	7,18	57
Tinondo	261,13	7,50	36
Uluwoi	712,39	4,39	8
Ueesi	1435,32	3,36	3
Kolaka Timur	3.654,74	100,00	34

Sumber: Kolaka Timur Dalam Angka Tahun 2020

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2019 mencapai 34 jiwa/Km². Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Lambandia dengan kepadatan sebesar 175 jiwa/Km² dan terendah di Kecamatan Ueesi sebesar 3 jiwa/Km².

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Kolaka Timur tahun 2019 sebesar 103.298 orang, dengan jumlah yang bekerja sebesar 99.937 orang dan menganggur sebanyak 3.352 orang. Jika dilihat dari jenis kelamin jumlah pengangguran laki- laki lebih kecil di bandingkan perempuan. Tingkat Pengangguran di Kabupaten Kolaka Timur sebesar 3,25 persen, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 77,37 persen.

Tabel 2-9. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Timur, 2019

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		JUMLAH
	Laki-Laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	63.998	39.291	103.298
Bekerja	61.812	38.125	99.937
Pengangguran terbuka	2.186	1.166	3.352
Bukan Angkatan Kerja	5.451	24.725	39.203
Sekolah	2.167	3.238	5.405
Mengurus R Tangga	2.086	20.740	22.826
Lainnya	1.198	774	1.972
Jumlah Total	69.449	64.043	133.492
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	92,15	61,35	77,37
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,42	2,97	3,25

Sumber: Kolaka Timur Dalam Angka Tahun 2020

Bila dilihat dari lapangan usaha dan jenis kelamin dapat diketahui bahwa persentase pekerja terbanyak terdapat pada sektor jasa yaitu sebesar 46,180 persen.

Tabel 2-10. Penduduk Berumur 15 Tahun Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Timur 2019

No	Lapangan Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pertanian	30,997	12,056	43,053
2	Manufaktur	8,344	2,360	10,704
3	Jasa	22,471	23,709	46,180
Jumlah		61,812	38,125	99,937

Sumber: Kolaka Timur Dalam Angka Tahun 2020

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Kolaka Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun 2018 sebesar 916 orang.

Tabel 2-11. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kolaka Timur, 2019

Pendidikan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	% Bekerja terhadap Angk Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD	39.783	473	40.256	98,83
SLTP	18.875	198	19.073	98,96
SLTA	18.875	2.409	30.746	92,16
Perguruan Tinggi	12.942	272	13.214	97,94
Jumlah	99.937	3.352	103.289	96,75

Sumber: Kolaka Timur Dalam Angka Tahun 2020

Persentase bekerja terhadap angkatan kerja tertinggi pada jenjang pendidikan SLTP sebesar 98,83 %, sedangkan terendah adalah pada jenjang pendidikan perguruan tinggi sebesar 97,75 %.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat menjadi salah satu prioritas untuk menangani berbagai isu yang berkembang tentang tingkat kesejahteraan masyarakat terutama kemajuan dibidang ekonomi. Pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur pada tahap kedua atau setelah rampungnya RPJMD tahun 2016-2021 dan memasuki RPJMDaerah Tahun 2021-2026 menuntut perhatian lebih tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Kolaka Timur yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan visi; “ **SEJAHTERA BERSAMA MASYARAKAT KOLAKA TIMUR YANG AGAMIS, MAJU MANDIRI DAN BERKEADILAN**” dengan misi ;

- 1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Serta Budaya Lokal;
- 2) Peningkatan Aksebilitas, Pemerataan Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- 3) Percepatan Kualitas Infrastruktur Publik Yang Memadai Dan Efektif;
- 4) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Transparan Melayani Masyarakat;

- 5) Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Penguatan, UMKM, Koperasi Dan Pelaku Usaha;
- 6) Penguatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat;
- 7) Pembinaan Dan Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga Dan Seni Budaya;
- 8) Mengembangkan Potensi Wisata;
- 9) Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Damai Dan Tertib;
- 10) Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Profesional, Selaras, Serasi Dan Seimbang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;

A.1. Pertumbuhan Ekonomi /PDRB

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Kolaka Timur mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fundamental ekonomi makro yang memburuk diakibatkan oleh pandemik Covic-19. Pertumbuhan investasi dan keyakinan pada kinerja perekonomian Nasional dipengaruhi oleh pandemik Covic-19 membuat pertumbuhan ekonomi Nasional mengalami penurunan di tahun ini. Perkembangan sektor ekonomi berdampak langsung terhadap peningkatan PDRB dan nilai PDRB perkapita yang pada hakekatnya menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Salah satu indikator perekonomian maju adalah perekonomian yang outputnya sebagian besar komoditas olahan; yang berarti nilai tambah produk sudah semakin besar didapatkan oleh masyarakat lokal. Indikator ini telah terjadi pada *trend* perekonomian Kabupaten Kolaka Timur dimana kontribusi sektor primer semakin mengecil sementara kontribusi sektor olahan sekunder maupun tersier semakin dominan.

Perekonomian Kabupaten Kolaka Timur dari tahun 2016 sampai tahun 2019 menggambarkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Kolaka Timur. Pertumbuhan terbesar pada tahun 2016 (7,40 persen), dan sebaliknya yang terkecil tahun 2019 (5,63 persen). Perlambatan laju pertumbuhan tahun 2019 sebagian besar disebabkan oleh stagnannya perekonomian pada sektor pertanian, transportasi, jasa perusahaan dan jasa pendidikan dimana sektor ini tidak sama sekali tumbuh bahkan nilainya negatif. Hal tersebut tentunya berdampak signifikan terhadap perekonomian di tahun berikutnya.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan dan galian serta sektorkonstruksi yang tumbuh sebesar 9,65 persen. Kemudian berturut-turut diikuti oleh Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Informasi dan Komunikasi yang masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 8,65 persen dan 8,56 persen.

Tabel 2-12. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016-2019

LAPANGAN USAHA		2016	2017	2018	2019*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,47	5,39	6,37	4,91
B	Pertambangan dan Penggalian	12,47	3,42	6,88	9,65
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	9,91	7,21	0,12	0,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,38	5,94	1,63	5,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,13	0,12	5,7	8,65
F	Konstruksi	13,82	3,69	6,99	9,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,2	7,46	5,93	5,50
H	Transportasi dan Pergudangan	10,18	4,35	9,04	5,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,73	5,62	6,64	5,11
J	Informasi dan Komunikasi	9,76	8,44	8,2	8,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,64	4,61	2,06	4,63
L	Real Estat	3,18	4,17	2,78	4,55
M,N	Jasa Perusahaan	10,17	5,98	5,22	2,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,55	4,13	5,33	4,10
P	Jasa Pendidikan	10,98	3,13	6,59	1,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,25	3,21	5,86	4,86
R,S, T,U	Jasa lainnya	6,27	2,74	5,41	4,86
Produk Domestik Regional Bruto		7,40	5,11	6,10	5,63

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: Kolaka Timur Dalam Angka Tahun 2020

Secara umum, perekonomian suatu wilayah dapat diketahui melalui distribusi tiap sektor terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Berdasarkan distribusi tiap sektor dapat diperoleh struktur ekonomi di wilayah tersebut. Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2019, Perekonomian kabupaten Kolaka Timur masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kontribusi dari sektor Pertanian mencapai 42,06 persen, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan 13,75 persen dan konstruksi 11,78 persen.

Tabel 2-13. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB tahun 2016 s.d. 2019 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Kolaka Timur

No.	Lapangan Usaha	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42,59	4,47	42,66	5,39	42,27	6,37	42,06	4,91
2	Pertambangan dan Penggalian	9,64	12,47	9,42	3,42	9,49	6,88	9,87	9,65
3	Industri Pengolahan	3,27	9,91	3,39	7,21	3,23	0,12	3,08	0,04
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	9,38	0,02	5,94	0,02	1,63	0,02	5,95
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,18	4,13	0,17	0,12	0,16	5,70	0,17	8,65
6	Konstruksi	11,43	13,82	11,19	3,69	11,52	6,99	11,78	9,65
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,90	9,20	13,46	7,46	13,67	5,93	13,75	5,50
8	Transportasi dan Pergudangan	2,22	10,18	2,17	4,35	2,25	9,04	2,25	5,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,50	5,73	0,5	5,62	0,48	6,64	0,48	5,11

10	Informasi dan Komunikasi	1,19	9,76	1,22	8,44	1,22	8,20	1,23	8,56
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,09	6,64	2,1	4,61	2,04	2,06	2,02	4,63
12	Real Estate	1,36	3,18	1,34	4,17	1,28	2,78	1,25	4,55
13	Jasa Perusahaan	0,20	10,17	0,21	5,98	0,21	5,22	0,20	2,35
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	6,25	3,55	6,13	4,13	6,13	3,87	6,02	4,10
15	Jasa Pendidikan	3,69	10,98	3,64	3,13	3,64	6,59	3,47	1,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,87	9,25	0,85	3,21	0,86	5,86	0,85	4,86
17	Jasa Lainnya	1,60	6,27	1,55	2,74	1,53	5,41	1,50	4,86
	PDRB	100,00	7,40	100,00	5,11	100,00	6,01	100,00	5,63

Sumber : BPS Kabupaten Kolaka Tahun 2020

A.2. PDRB Perkapita

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kolaka Timur akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2014 sampai dengan 2018, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Kolaka Timur digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

Kondisi perekonomian Kabupaten Kolaka Timur menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan baik melalui peningkatana komponen PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK), maupun pertumbuhan pada total PDRB. PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 2-14. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.022,69	2.204,82	2.429,94	2.668,12	2.908,39
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	25,23	27,16	30,69	33,83	37,35
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	315,18	346,06	378,60	418,80	448,24
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.105,72	1.223,69	1.383,56	1.524,92	1.653,34
Perubahan Inventori	91,78	57,68	164,01	21,35	31,01
Ekspor Barang dan Jasa	360,80	325,06	403,03	452,13	461,94
Dikurangi: Impor Barang dan Jasa	778,72	682,62	993,94	1 010,99	1 113,12
Diskrepansi Statistik 1	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	3.142,69	3.501,84	3.795,90	4.108,16	4.427,15

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: Kolaka Timur Dalam Angka Tahun 2020

Nilai PDRB Kabupaten Kolaka Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) selama periode tahun 2015 s.d 2019 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut mencapai 43.79 persen dari tahun 2015 sampai tahun 2019.

Tabel 2-15. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2014-2019 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Konsumsi Rumah Tangga	1 637 909,77	1 731 580,82	1 839 704,73	1 961 343,42	2 081 282,44
2. Konsumsi LNPRT	21 416,52	22 061,52	24 116,81	26 043,03	28 215,19
3. Konsumsi Pemerintah	250 720,02	259 963,43	270 310,95	287 361,68	299 919,39
4. PMTB	1 009 942,90	1 087 856,84	1 167 051,30	1 235 151,62	1 311 438,18
5. Perubahan Inventori	87 379,98	76 983,95	192 157,12	20 635,71	23 355,97
6. Ekspor	328 220,59	271 733,26	293 373,87	433 206,16	455 772,81
7. Impor	727 890,39	649 433,43	842 781,98	842 768,07	903 211,81
Total P D R B	2 607 699,39	2 800 746,39	2 943 932,79	3 120 973,54	3 296 772,18

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: Kolaka Timur Dalam Angka. Tahun 2020

B. Kesejahteraan Sosial

B.1. Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar daerah dan antar waktu, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka. Melalui pengukuran kemiskinan, dapat dilihat persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2018, dimana Konawe Kepulauan merupakan kabupaten dengan persentase tertinggi yaitu 17,48 persen, sedangkan Kota Kendari memiliki persentase terendah yaitu 4,69 persen.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. antara lain: tingkat pendapatan. kesehatan. pendidikan. akses terhadap barang dan jasa. lokasi geografis. gender. dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi. Tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif. tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik. ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi

masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

Untuk menjamin implementasi SDGs berjalan dengan baik, pemerintah telah membentuk Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sekretariat Nasional SDGs bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan terkait pelaksanaan SDGs di Indonesia. Sejumlah pemangku kepentingan yang mencakup kementerian/lembaga, BPS, akademisi, pakar, organisasi masyarakat sipil dan filantropi & bisnis telah dilibatkan dalam berbagai proses persiapan pelaksanaan SDGs di Indonesia. Dalam implementasinya, ada beberapa prinsip yang telah disepakati juga diadopsi oleh Indonesia. Prinsip pertama adalah universality. Prinsip ini mendorong penerapan SDGs di semua negara baik negara maju maupun negara berkembang. Dalam konteks nasional, implementasi SDGs akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip kedua adalah integration. Prinsip ini mengandung makna bahwa SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Prinsip kedua ini telah dipegang teguh dalam penyusunan rencana aksi khususnya terkait dengan penyusunan program dan kegiatan serta penganggarannya. Prinsip terakhir adalah “No One Left Behind” yang menjamin bahwa pelaksanaan SDGs harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan dan pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan.

Prinsip ini juga telah diterapkan dalam setiap tahapan/proses pelaksanaan SDGs di Indonesia..

Pencapaian target SDGs bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, namun wajib pula diikuti oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya pedoman penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) dengan harapan agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SDGs pada tahun 2030 nantinya dapat tercapai. Selain itu, agar SDGs dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, maka sangat perlu mengintegrasikan SDGs ke dalam dokumen perencanaan daerah. Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, mewajibkan pengintegrasian SDGs dalam dokumen perencanaan, meliputi perencanaan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), dan jangka pendek atau perencanaan tahunan (RKPD dan Renja PD).

Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SDGs sebagai berikut:

- Tujuan 1. Menghapus segala bentuk kemiskinan
- Tujuan 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan
- Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia
- Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua

- Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- Tujuan 6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan
- Tujuan 7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern
- Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua
- Tujuan 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
- Tujuan 10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara
- Tujuan 11. Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
- Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- Tujuan 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
- Tujuan 14. Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan
- Tujuan 15. Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
- Tujuan 16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan

akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua

Tujuan 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Untuk mengukur kemiskinan digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penghitungannya dilakukan terpisah antara perdesaan dan perkotaan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Nilai Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Perhitungan pada angka kemiskinan tabel di bawah di dasarkan pada listing atau penentuan Populasi berdasarkan Kepala Keluarga (KK). Asumsi yang digunakan adalah ketika kepala keluarga miskin, maka anggota keluarga lainnya akan dianggap miskin. Dengan demikian Kepala Keluarga miskin adalah Kepala Keluarga yang memiliki rata-rata pengeluaran

dalam rumah tangganya per kapita per bulan di bawah 2.100 kalori per hari.

Tabel 2-16. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, 2014 – 2018

Kabupaten		Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
1	Buton	14,31	13,75	13,22	13,46	13,67	13,65
2	Muna	14,46	15,45	15,22	14,85	13,19	12,85
3	Konawe	15,47	16,09	16,09	15,65	13,48	12,34
4	Kolaka	14,99	14,68	15,05	13,78	12,51	11,92
5	Konawe Selatan	11,60	11,58	11,36	11,14	10,95	10,81
6	Bombana	13,20	12,55	13,06	12,36	11,05	10,56
7	Wakatobi	16,27	16,88	16,46	16,19	14,85	14,75
8	Kolaka Utara	16,10	16,53	17,11	16,24	14,30	13,19
9	Buton Utara	16,35	15,86	15,78	15,58	14,93	14,38
10	Konawe Utara	10,15	9,97	9,75	13,93	14,22	13,66
11	Kolaka Timur	-	15,57	15,71	15,64	13,82	13,71
12	Konawe Kepulauan	-	16,73	17,72	18,10	17,48	17,18
13	Muna Barat	-	-	15,77	16,24	14,17	13,84
14	Buton Tengah	-	-	13,69	18,35	14,88	15,77
15	Buton Selatan	-	-	13,74	15,99	14,82	14,66
16	Kendari	5,56	5,59	5,51	5,01	4,69	4,44
17	Bau-Bau	9,25	9,24	8,81	8,39	7,57	7,27
Sulawesi Tenggara		12,77	12,90	12,88	12,81	11,63	11,24

Sumber: Kolaka Timur Dalam Angka Tahun 2020

B.2. Perlindungan Sosial

Pembangunan sosial diarahkan untuk memperluas pelayanan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terutama bagi penduduk yang mengalami kemiskinan, serta korban bencana alam dan bencana sosial, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan antara lain melalui: pemberdayaan, pemberian santunan, rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan sosial, Pemberian bantuan dan sumbangan social masyarakat, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial terdapat pilar partisipan dari warga masyarakat sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial adalah perorangan maupun kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu lembaga sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi aktif dalam membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Kondisi yang diinginkan dengan berbagai program di bidang penanganan masalah sosial yaitu menurunnya jumlah penyandang masalah sosial. Perlu dipahami bahwa PMKS tidak semata-mata masalah kemiskinan atau penduduk miskin, tetapi juga berhubungan dengan masalah anak jalanan, anak nakal, korban narkoba, bayi terlantar, lansia terlantar, penyandang cacat fisik, pengemis, gelandangan dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti diatas, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah melaksanakan upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang

dilaksanakan setiap tahun. Gambaran PMKS di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2018 terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2-17. Jumlah pekerja Sosial dan Penyandang Disabilitas Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018

Kecamatan	Pekerja sosial masyarakat	Jenis Penyandang cacat			
		Tuna Mental	Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Daksa
Aere	0	25	10	12	24
Lambandia	2	16	15	16	53
Poli-Polia	3	38	14	7	16
Dangia	2	1	1	0	8
Ladongi	0	2	21	10	14
Loea	1	5	0	0	17
Tirawuta	1	3	4	0	20
Lalolae	0	23	1	1	4
Mowewe	0	29	1	3	11
Tinondo	1	31	11	10	19
Uluiwoi	0	3	0	0	1
Ueesi	0	3	4	0	3
Kolaka Timur	10	179	82	59	190

Sumber: Kolaka Timur Dalam Angka Tahun 2019

Kondisi yang diinginkan dengan berbagai program di bidang penanganan masalah sosial yaitu menurunnya jumlah penyandang masalah sosial. Menurut Permensos Nomor 8 Tahun 2012. Perlu dipahami bahwa PMKS tidak semata-mata masalah kemiskinan atau penduduk miskin, tetapi juga berhubungan dengan Anak berhadapan dengan hukum, Korban Bencana Alam, Anak Dengan Kedisabilitas, Keluarga Miskin, Anak Terlantar dan Penyandang Cacat. Dengan pemahaman seperti di atas, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah melaksanakan upaya-

upaya dalam bentuk program dan kegiatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilaksanakan setiap tahun. Gambaran PMKS di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2020 terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2-18. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020

Jenis Penyandang Kesejahteraan Sosial						
Kecamatan	Penyandang Disabilitas	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Fakir Miskin	Anak Dengan Kedisabilitas	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial
Aere	27	65	120	7	670	5
Lambandia	49	134	173	2	343	3
Poli-Polia	47	84	124	2	0	0
Dangia	44	27	54	1	450	2
Ladongi	73	70	164	3	0	24
Loea	33	70	118	1	5	0
Tirawuta	112	114	216	5	0	0
Lalolae	29	15	123	2	0	0
Mowewe	61	42	142	5	0	6
Tinondo	58	35	241	3	0	3
Uluwoi	91	112	151	4	28	0
Ueesi	64	78	184	2	0	0

Sumber : Data Dinas Sosial Kab. Kolaka Timur, 2020

B.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi pembangunan. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya karena nilai IPM mencakup 3 bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar, yaitu Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Nilai ini menggambarkan potret pembangunan manusia Kabupaten Kolaka Timur dari kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) .

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). • IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah, , IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Peningkatan IPM pada prinsipnya merupakan perubahan pola pikir manusia yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan); peningkatan intelektual (pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

Secara umum. pembangunan manusia di Kolaka Timur selama periode 2016-2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 IPM Kolaka Timur mencapai 63.60 Telah terjadi kenaikan sebesar 0.95 basis poin menjadi 64.55 pada 2017. Pada tahun 2018 IPM Kolaka Timur meningkat sebesar 0.98 basis poin meningkat menjadi 65.53 dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 66,49.

Menurut kriteria pembangunan manusia dan kesetaraan gender, maka Kolaka Timur kurun waktu 2016-2019 berada dalam posisi sedang, mengacu pada batasan besaran $60 \leq \text{IPM} \leq 70$ sebagai wilayah dengan IPM terkategori sedang. Peningkatan angka IPM tidak terlepas dari peran pemerintah untuk terus menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan merata, peningkatan pelayanan kesehatan. Serta penyediaan lapangan pekerjaan layak bagi masyarakat Kolaka Timur. Peningkatan angka IPM merupakan gabungan dari meningkatnya kualitas kesehatan, pendidikan dan standar hidup.

Tabel 2-19. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara 2015 - 2019

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Buton	62,78	63,69	64,47	65,08	65,67
Muna	65,99	66,96	67,61	68,47	68,97
Konawe	69,56	69,84	70,24	70,72	71,29
Kolaka	70,47	71,12	71,46	72,07	73,01
Konawe Selatan	66,32	66,97	67,23	67,51	67,88
Bombana	63,65	64,02	64,49	65,04	65,65
Wakatobi	67,22	67,50	67,99	68,52	68,99
Kolaka Utara	66,90	67,60	67,77	68,44	68,91
Buton Utara	65,23	65,95	66,40	67,13	67,68
Konawe Utara	66,44	67,20	67,71	68,50	69,22
Kolaka Timur	62,74	63,60	64,55	65,53	66,49
Konawe Kepulauan	61,72	62,56	63,44	64,36	65,05
Muna Barat	62,29	62,57	63,43	64,11	64,45
Buton Tengah	62,13	62,56	62,82	63,46	64,06
Buton Selatan	62,00	62,55	63,20	63,47	64,37
Kota Kendari	81,43	81,66	81,83	82,22	82,86
Kota Bau-Bau	73,59	73,99	74,14	74,67	75,21
Sulawesi Tenggara	68,75	69,31	69,86	70,61	71,20

Sumber: Kolaka Timur Dalam Angka, Tahun 2020

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

A. Pendidikan

Dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang itu hanya bisa dicapai melalui Pendidikan. Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional dengan demikian secara otomatis juga merupakan prioritas pembangunan di daerah. Sehingga Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia mengandung makna bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan kompleks.

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang baik yang normal maupun yang berkelainan, yang berkemampuan cerdas maupun yang rendah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidaknya-tidaknya selama 9 Tahun. Untuk itu pembangunan pendidikan diarahkan untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Sasaran pembangunan pendidikan dititikberatkan pada peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar disemua jenjang pendidikan. Dimulai dari kegiatan prasekolah (Taman Kanak-Kanak)sampai dengan Perguruan Tinggi. Upaya

peningkatan mutu pendidikan yang ingin dicapai tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan manusia berkualitas. Sedangkan perluasan kesempatan belajar dimaksud agar penduduk usia sekolah yang setiap tahun mengalami peningkatan sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dapat memperoleh kesempatan belajar yang seluas-luasnya. Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur seperti banyaknya sekolah dan guru. Perkembangan berbagai rasio dan sebagainya.

Tabel 2-20. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018

Angka Partisipasi sekolah						
Kelompok Unur	2013	2014	2015	2016	2017	2018
7 – 12	95.94	98.45	99.68	100.00	100.00	99,51
13 – 15	84.17	91.73	92.50	94.62	95.51	94,70
16 – 18	56.62	62.26	65.20	69.59	66.69	64,82
19 – 24	10.07	15.24	7.65	22.29	66.69	

Sumber : Kolaka Timur Dalam Angka. Tahun 2019

Pada angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2018 adalah sebesar 99,51 untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar. pada jenjang Sekolah Menengah Pertama angka partisipasi sekolah sebesar 94,70 dan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas sebesar 64,82. Hampir semua anak usia 7-12 tahun sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. tingginya angka partisipasi sekolah pada kelompok umur

ini di pengaruhi oleh program pemerintah pendidikan gratis untuk semua. Tingkat partisipasi sekolah penduduk usia sekolah cenderung menurun di semua angka partisipasi sekolah.

Tabel 2-21. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk berumur 7-18 Tahun menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Koltim
7-12	99,03	100,00	99,51
13-15	97,82	92,06	94,70
16-18	68,17	59,85	64,82

Sumber : Kolaka Timur Dalam Angka. Tahun 2019

B. Kesehatan

Aksesibilitas masyarakat terhadap kesehatan yang lebih berkualitas merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai pelaku sekaligus objek pembangunan. Pembangunan dibidang kesehatan di Kabupaten Kolaka Timur diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan dengan memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui upaya pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Pemenuhan kebutuhan dasar akan kesehatan yang layak diwujudkan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan itu sendiri pemerataan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu faktor ditunjang dengan pelayanan kesehatan secara optimal dan berkualitas terhadap masyarakat terutama

masyarakat miskin. serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

Tabel 2-22. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kolaka Timur Tahun 2019

No	Kecamatan	RS. Umum	Puskes Mas	Pustu	Pos yandu	BP/ Clinic	Rumah Bersalin	Polindes
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ladongi	1	1	1	7	1	-	1
2	Lambandia	-	1	3	5	-	-	6
3	Tirawuta	-	1	2	8	-	-	-
4	Mowewe	-	1	3	5	-	-	-
5	Uluiwoi	-	1	5	0	-	-	-
6	Tinondo	-	1	2	6	-	-	-
7	Lalolae	-	1	2	5	-	-	-
8	Poli-Polia	-	1	-	7	-	-	2
9	Aere	-	1	-	4	-	-	-
10	Dangia	-	1	1	3	-	-	2
11	Loea	-	1	5	4	-	-	-
12	Ueesi	-	1	3	0	-	-	1
Jumlah/Total		1	12	27	54	1	-	12

Sumber: Kolaka Timur Dalam Angka. Tahun 2020

C. Keluarga Berencana

Pembangunan di bidang kependudukan. pemberdayaan keluarga kesehatan, reproduksi remaja dan Keluarga Berencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran. Memperkecil angka kematian dan peningkatan kualitas program Keluarga Berencana (KB). Kebijakan ini meliputi : pemberdayaan keluarga termasuk langkah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan. terutama bagi keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan

dasarnya serta peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga; promosi dan peningkatan kesehatan reproduksi remaja; promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang difokuskan kepada peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, terutama bagi keluarga-keluarga miskin dan rentan termasuk Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I); serta penguatan kelembagaan agar secara bertahap program KB dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri. Keseluruhan kebijakan ini akan dilaksanakan dengan mengutamakan kemitraan serta memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Tabel 2-23. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Target dan Realisasi Akseptor KB Baru Menurut Kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur 2019

Kecamatan	Pasangan Usia Subur (PUS)	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aere	1,917	420	139	33.10
Lambandia	3,719	581	187	32.19
Poli-Polia	2,611	285	304	106.67
Dangia	2,115	346	530	153.18
Ladongi	3,247	486	475	97.74
Loea	1,383	174	168	96.55
Tirawuta	3,613	482	655	135.89
Lalolae	781	117	97	82.91
Mowewe	1,512	237	95	40.08
Tinondo	1,504	257	242	94.16
Uluwoi	1,234	158	189	119.62
Ueesi	942	140	45	32.14
Kolaka Timur	24,578	3,683	3,126	84.88

Sumber: Kolaka Timur Dalam Angka, Tahun 2020

Jumlah pasangan usia subur Tahun 2019 yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab. Kolaka Timur mencapai 24.578 dari target 3.683 pasangan, terealisasi 84,88% atau 3.126 pasangan usia subur.

D. Investasi

Penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

Kabupaten Kolaka Timur memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya mineral yang cukup melimpah. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten menyadari keterbatasan sumber dana maupun sumber daya manusia dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan mineral tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan investasi baik dari perusahaan/pemilik modal maupun investasi masyarakat. Data mengenai nilai yang diinvestasikan di Kabupaten Kolaka Timur terdapat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 2-24 Jumlah Perusahaan Industri menurut Skala Usaha di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019

No	Skala Usaha	Usaha	
		Terdaftar	Aktif
1	2	3	4
1	Besar		
2	Sedang		
3	Kecil	8	68
4	Micro	8	229
Jumlah		16	297

Sumber : Kolaka Timur Dalam Angka. Tahun 2020

Tabel 2-25. Jumlah Perusahaan Industri menurut jumlah tenaga kerja dan kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019

Jumlah Perusahaan				
Kecamatan	Tenaga Kerja 1-4 orang	Tenaga Kerja 519 orang	Tenaga Kerja 20-99 orang	Tenaga Kerja >=100 orang
Aere			61	
Lambandia			54	
Poli-Polia				309
Dangia			75	
Ladongi			26	
Loea			97	
Tirawuta			88	
Lalolae			49	
Mowewe			54	
Tinondo				109
Uluiwoi			44	
Ueesi			37	
Kolaka Timur			585	418

Sumber : Kolaka Timur Dalam Angka. Tahun 2020

E. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Kolaka Timur tahun 2019 sebesar 103.298 orang, dengan jumlah yang bekerja sebesar 99.937 orang dan menganggur sebanyak 3.352 orang. Jika dilihat dari jenis kelamin jumlah pengangguran laki- laki lebih kecil di bandingkan perempuan. Tingkat Pengangguran di Kabupaten Kolaka Timur sebesar 3,25 persen, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 77,37 persen.

Tabel 2-26. Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja, TPAK dan TPT di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019

KEGIATAN UTAMA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Angkatan Kerja	63.998	39.291	103.298
Bekerja	61.812	38.125	99.937
Pengangguran terbuka	2.186	1.166	3.352
Bukan Angkatan Kerja	5.451	24.725	39.203
Sekolah	2.167	3,238	5.405
Mengurus R Tangga	2.086	20.740	22.826
Lainnya	1.198	774	1.972
Jumlah Total	69.449	64.043	133.492
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	92,15	61,35	77,37
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,42	2,97	3,25

Sumber : Kolaka Timur Dalam Angka. Tahun 2020

Perbandingan penduduk yang bekerja, laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan tercatat 61,812 persen laki-laki yang bekerja dan 38,125 persen perempuan yang bekerja. Proporsi terbesar pekerja pada bidang jasa yaitu sebesar 46,180 persen seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-27. Penduduk Berumur 15 Tahun Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kolaka Timur 2019

No	Lapangan Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pertanian	30,997	12,056	43,053
2	Manufaktur	8,344	2,360	10,704
3	Jasa	22,471	23,709	46,180
Jumlah		61,812	38,125	99,937

Sumber: Kolaka Timur Dalam Angka Tahun 2020

F. Pertanian

Fokus pembangunan di sektor pertanian adalah peningkatan produksi dan produktifitas komoditas utama yaitu tanaman pangan dan perkebunan. Tanaman pangan meliputi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan tanaman perkebunan meliputi kakao, lada, dan kelapa.

G. Tanaman Pangan

Tanaman pangan yang diusahakan di Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2019 terdiri dari tujuh jenis tanaman yang utama yaitu : padi sawah, padi ladang, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah dan kacang hijau.

Produksi padi sawah di Kabupaten Kolaka Timur yaitu sebesar 101.164,90 ton. Sementara itu untuk tanaman jagung, produksi di Kabupaten Kolaka Timur sebesar 56.018,58 ton.

Tabel 2-28. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019

KECAMATAN	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton)
Aere	406,20	399,10	1.609,17	4,03
Lambandia	8.398,00	8.259,60	33.302,71	4,03
Poli-Polia	1.375,30	1.332,80	5.373,85	4,03
Dangia	938,00	938,00	3.782,02	4,03
Ladongi	5.956,60	5.172,60	20.855,92	4,03
Loea	2.655,30	2.330,30	9.395,77	4,03
Tirawuta	1.284,80	1.497,70	6.038,73	4,03
Lalolae	789,70	681,10	2.746,20	4,03
Mowewe	2.223,60	2.098,90	8.462,76	4,03
Tinondo	2.002,60	2.380,40	9.597,77	4,03
Uluiwoi	5,00	-	-	-
Ueesi	4,00	-	-	-
Kolaka Timur	26.039,10	25.090,50	101.164,90	4,03

Sumber : Dinas pertanian & peternakan 2020

Tabel 2-29. Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Jagung di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019

KECAMATAN	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton)
Aere	299,00	1.006,00	4.590,38	4,56
Lambandia	1.480,40	2.800,10	12.776,86	4,56
Poli-Polia	983,00	931,00	4.248,15	4,56
Dangia	1.310,00	1.063,00	4.850,47	4,56
Ladongi	165,00	92,00	419,80	4,56
Loea	708,10	841,40	3.839,31	4,56
Tirawuta	511,00	582,00	2.655,67	4,56
Lalolae	1.467,00	1.491,00	6.803,43	4,56
Mowewe	26,00	86,20	393,33	4,56
Tinondo	1.188,00	1.379,00	6.292,38	4,56
Uluiwoi	2.016,00	1.123,00	5.124,25	4,56
Ueesi	756,00	882,00	4.024,57	4,56
Kolaka Timur	10.909,50	12.276,70	56.018,58	4,56

Sumber : Dinas pertanian & peternakan 2020

H. Hortikultura

Produksi tanaman hortikultura di kabupaten Kolaka Timur cukup bervariasi. Untuk tanaman sayuran terdapat bawang merah, cabai, kacang panjang, tomat, dan lain-lain.

Untuk tanaman buah-buahan di Kabupaten Kolaka Timur terdapat beberapa macam diantaranya jeruk, mangga, pisang, duku dan buah-buahan lainnya. Pisang merupakan komoditi yang paling besar produksinya yaitu sebesar 33.826,27 kuintal.

Tabel 2-30. Luas Panen Horti/Tanaman Sayuran
di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020

No.	Komoditi	Luas Lahan (ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas) Kg/ha
1.	Bawang merah (<i>Shallot</i>)	40	160	4.000
2.	Cabai besar (<i>Big chili</i>)	65	4.176	64.246,15
3.	Cabai rawit (<i>cayenne pepper</i>)	162	9.418	58.135,8
4.	Kubis (<i>Cabbage</i>)	2	65	32.500
5.	Tomat (<i>Tomato</i>)	121	6.851	56.619,83
6.	Kacang panjang (<i>Long beans</i>)	113	6.399	56.628,32
7.	Bawang daun (<i>Scallion</i>)	40	59,9	14.97,5
8.	Ketimun (<i>Cucumber</i>)	62	354,3	57.14,516
9.	Sawi (<i>Mustard green</i>)	54	62,8	1.162,963
10.	Semangka (<i>Water melon</i>)	19	755,2	39.747,37

Sumber : Dinas perkebunan dan hortikultura 2020

Tabel 2-31. Produksi Tanaman Buah-buahan (ton) Menurut
Kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019

KECAMATAN	Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Salak
Aere	41,5	28,1	1,5	323,2	12,9	6,7
Lambandia	401,3	25,7	9,6	168,7	15,6	136,1
Poli-Polia	9,8	4	4	41	17,2	2,4
Dangia	10,5	38,4	-	200,2	15,2	-
Ladongi	16,4	18,6	11,2	94,4	168,6	-
Loea	126,6	12,8	1	60,6	6,6	2,1
Tirawuta	45	40	3,1	83	6,5	0,5
Lalolae	22,7	17,8	17,6	35,7	14,3	-
Mowewe	612,8	1545	-	202,7	1,6	1,4
Tinondo	92,1	17,2	23,4	196,9	79,3	2,9
Uluwoi	65,4	87,6	-	161,3	24,5	-
Ueesi	13,6	78,3	-	234,3	7,2	-
Kolaka Timur	750	1457,7	71,4	180,2	369,5	152,1

Sumber : Kolaka Timur Dalam Angka. Tahun 2020

I. Perkebunan

Komoditi perkebunan terbesar di Kabupaten Kolaka Timur adalah kakao. Pada tahun 2020 jumlah produksi tanaman kakao mencapai 19.684 ton dengan luas lahan keseluruhan 60.327 hektar.

Tabel 2-32. Luas Areal Dan Produksi Perkebunan Rakyat Tanaman Kakao Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016-2020

	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Luas Lahan Kakao (Belum Produktif)	Ha	12.244	12.243	12.793	7.921	5.970
Luas Lahan Kakao (Produktif)	Ha	48.712	48.159	48.160	44.626	42.472
Luas Lahan Kakao (Tidak Produktif)	Ha	8.709	8.708	8.089	11.146	11.885
Jumlah Produksi Kakao	Ton	32.775	30.988	30.989	28.355	19.684
Jumlah Produktifitas Kakao	Kg/Ha	680,6	643,5	643	635,4	463,5

Sumber : Dinas perkebunan dan hortikultura 2020

J. Peternakan

Produksi daging hewan ternak di Kabupten Kolaka Timur tahun 2018 yaitu 459.502 Kg. Sedangkan untuk ternak unggas, produksinya sebesar 168.090 Kg.

K. Perikanan

Luas potensi perikanan darat di Kabupaten Kolaka Timur dari tahun 2016 sampai tahun 2020 tergambar pada tabel dibawah ini beserta luas lahan/kolam terolah sampai tahun 2020.

Tabel 2-33. Luas Potensi dan Luas lahan terolah Budi daya Perikanan di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016-2020

Perikanan	2016	2017	2018	2019	2020	Ket
Luas Potensi Budidaya Perikanan (Ha)	306,88	310,35	310,35	254,43	272,00	
Luas Lahan/Kolam Terolah (Ha)	166,07	169,54	169,54	113,62	131,19	

Sumber : Dinas pertanian & peternakan 2020

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

A. Ketersediaan Infrastruktur Jalan

Jalan merupakan prasarana yang dilalui angkutan darat dimana sangat memegang peranan penting dalam memperlancar hubungan kegiatan perekonomian baik antara satu daerah ke daerah lainnya.

Kondisi jalan yang baik akan mempermudah mobilitas penduduk dan memperlancar transportasi memin- dahkan barang dalam hubungan kegiatan ekonomi dan sosial lainnya. Sebaliknya bilamana kondisi jalan kurang baik maka penduduk akan mendapat kesulitan dalam hubungan kegiatan ekonomi maupun aktifitas lainnya. Pada tahun 2018, untuk panjang jalan Kabupaten Kolaka Timur, terdapat 2,19 persen kondisi baik, 25,44 persen kondisi sedang, 36,03 persen kondisi rusak, dan 36,35 persen lainnya dalam kondisi rusak berat.

Sarana yang penting dalam mendukung laju pembangunan adalah prasarana jalan. Tersedianya jalan untuk menjangkau semua daerah di suatu wilayah pemerintahan sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan pendistribusian hasil pembangunan. Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional Jalan provinsi dan kabupaten harus selalu ditingkatkan baik panjang maupun kualitasnya agar pembangunan regional/nasional dapat berjalan lancar jaringan jalan yang baik dan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik. sedang. sedang rusak. rusak dan rusak berat.

Proporsi jalan di Kabupaten Kolaka Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-34. Panjang Jalan Menurut tingkat Kewenangan di Kabupaten Kolaka Timur (KM) Tahun 2016-2019

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2016	2017	2018	2019
Jalan Negara	50	50	50	50
Jalan Provinsi	67,90	67,90	67,90	67,90
Jalan Kabupaten	1036,70	1036,70	1036,70	1036,70
TOTAL	1.154,60	1.154,60	1.154,60	1.154,60

Sumber : Dinas PUPR dan Perhubungan Kolaka Timur Tahun 2020

Tabel 2-35. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Kolaka Timur (KM) Tahun 2019

Jenis Permukaan Jalan	2017	2018	2019
Aspal			84,74
Kerikil			433,44
Tanah			518,52
Lainnya			-
TOTAL	1.036,70	1.036,70	1.036,70

Sumber : Dinas PUPR dan Perhubungan Kolaka Timur Tahun 2020

Tabel 2-36. Panjang Jalan Menurut Kondisi (KM) Jalan di Kabupaten Kolaka Timur (KM) Tahun 2019

Kondisi Jalan	2017	2018	2019
Baik	22,680		84,74
Sedang	263,738		298,57
Rusak	373,487		134,87
Rusak Berat	376,795		518,52
Jumlah	1036,70	1036,70	1036,70

Sumber : Dinas PUPR dan Perhubungan Kolaka Timur Tahun 2020

B. Energi / Listrik

Selanjutnya perkembangan ketersediaan energi listrik sebagai pendukung penting pembangunan dan perekonomian. dimana Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan.

Tabel 2-37. Daya listrik tersambung dan jumlah pelanggan Rayon Kolaka di Kabupaten Kolaka Timur 2018

Kelompok Tarif	Daya Tersambung (KVA)	Jumlah Pelanggan
Sosial	80,35	75
Rumah Tangga	2.915,05	3.599
Bisnis	5,15	61
Industri	0,00	0
Instansi Pemerintah	33,60	22
Curah	0,00	6
Jumlah	3.124,15	3.763

Sumber : Kolaka Timur Dalam Angka. Tahun 2019

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2020

Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun diarahkan untuk memuat rumusan program, kegiatan serta pagu pembangunan daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD kabupaten Kolaka timur. Tahun 2020 adalah tahun ke empat periode RPJMD Kabupaten Kolaka Timur tahun 2016-2021.

Untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

2.3.1.1 Pendidikan

Kesadaran pentingnya pendidikan dalam pembangunan tidak disertai dengan peningkatan derajat pendidikan. Latar belakang yang berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan mencakup berbagai aspek, baik secara individu berupa tradisi/normal/perilaku, maupun aspek rumah tangga dan komunitas berupa pendapatan/kekayaan.

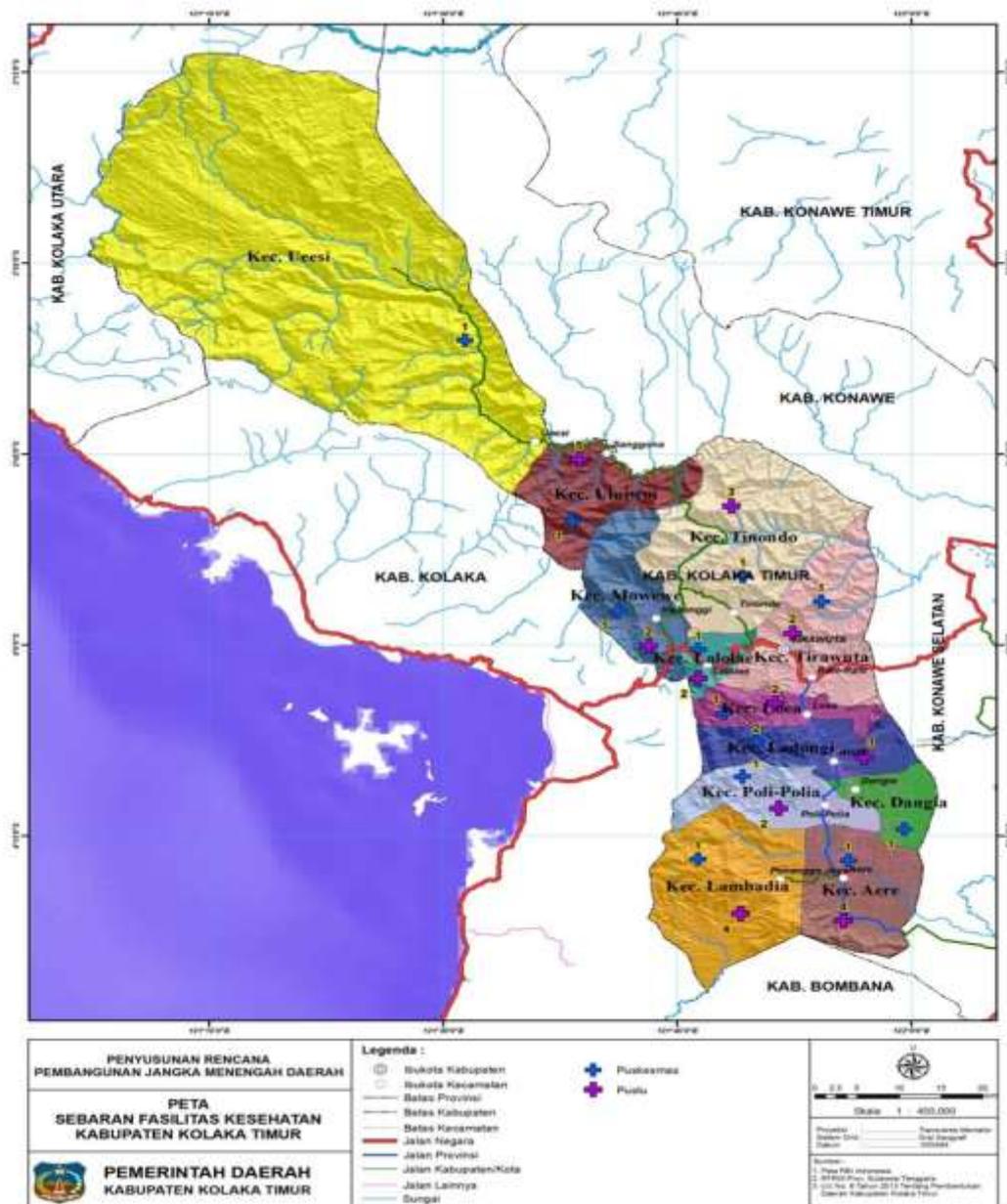
Secara khusus permasalahan bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat anak usia 7 – 12 tahun, usia 13 – 15 tahun dan usia 16 – 18 tahun yang tidak bersekolah.
2. Mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan walaupun rasio sekolah yang belum ideal.
3. Masih adanya anak putus sekolah, Meskipun kecenderungan angka putus sekolah di Kabupaten Kolaka Timur menurun.
4. Kompetensi guru yang masih harus ditingkatkan sehingga kualitas pembelajaran bisa tercapai.
5. masih dibutuhkannya tenaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah terpencil.
6. mengoptimalkan penduduk melek huruf untuk meningkatkan pembangunan manusia di kab. kolaka timur.

2.3.1.2 Kesehatan

Untuk mendukung penyelenggaraan pelayan kesehatan di Kabupaten Kolaka Timur dapat dilihat pada peta sebaran pelayanan kesehatan sebagai berikut :

Gambar 4-2. Peta Sebaran Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur



Dalam kerangka pembangunan kesehatan, Kabupaten Kolaka Timur menghadapi berbagai permasalahan yaitu:

1. Keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, sebagai implikasi kurang optimalnya fungsi dan peransarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan.
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Kualitas dan kuantitas SDM kesehatan berdasarkan spesifikasi profesi masih kurang, khususnya tenaga dokter Ahli yang melakukan pelayanan di rumah sakit. Dari aspek kualitas, jenis dan kuantitas tenaga kesehatan masih sangat kurang dibandingkan standar kesehatan yang seharusnya dan bila dibandingkan jumlah penduduk, beban kerja dan jumlah fasilitas kesehatan yang ada. Tingginya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan yang prima juga membutuhkan kualitas tenaga kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan formal maupun non formal sangat perlu ditingkatkan sesuai dengan jenjang profesi yang dimiliki.
3. Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap PHBS, Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menorepakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menyebabkan penyakit - penyakit berbasis masyarakat seperti demam berdarah, ISPA, dan diare, masih ber-endemi di masyarakat, terutama pada saat perubahan musim.
4. Kebutuhan sarana dan prasarana Kesehatan. Sarana dan prasarana yang memadai adalah hal penting untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan di masyarakat serta merupakan salah satu indikator yang menunjang keberhasilan di bidang kesehatan. Rasio sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dibanding penduduk, diharapkan 10:10.000 penduduk. Guna menjangkau pelayanan kesehatan terdekat, maka peran

puskesmas perlu dioptimalkan dengan mengadakan sarana layanan kegawatdaruratan dan pelayanan segera pada puskesmas-puskesmas tersebut.

5. Pelayanan Kesehatan yang terjangkau dan bermutu untuk masyarakat miskin saat ini, walaupun pemerintah telah berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan melalui BPJS.
6. Mengoptimalkan pembinaan Keluarga Berencana (KB)

2.3.1.3 Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2018 mencatat sebanyak 14.930 RTM dan individu sebesar 59.449. Banyaknya jumlah penduduk miskin tersebut menjadi salah satu permasalahan Kabupaten Kolaka Timur dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia. Secara khusus permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kolaka Timur adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi keluarga miskin dan rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi beban hidup, sedangkan kebutuhan hidup mereka semakin meningkat.
2. Kurangnya kemampuan dan keterampilan keluarga miskin yang menjadi daya dukung pendapatan.
3. Minimnya sosialisasi dan edukasi tentang keberadaan bantuan usaha skala mikro sehingga aksesibilitas keluarga miskin dalam rangka usaha skala mikro masih rendah.
4. Pemberdayaan keluarga miskin yang selama ini dilakukan oleh pihak pemerintah, pihak swasta ataupun oleh pihak-pihak lainnya lebih menekankan dan menitik beratkan pada program keluarga harapan (PKH), sedangkan bantuan sarana dan prasarana, khususnya bantuan lahan dan perumahan masih kurang maksimal.

2.3.1.4 Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah

Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya aktifitas masyarakat maka sudah seharusnya diimbangi dengan pembangunan infrastruktur fisik yang seimbang dengan perkembangan zaman, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang belum maksimal dengan perkembangan daerah. Secara khusus permasalahan infrastruktur tata ruang wilayah dan lingkungan adalah menyangkut perubahan penggunaan lahan, infrastruktur wilayah serta sistem transportasi belum maksimal.

2.3.1.4.1 Infrastruktur

Kabupaten Kolaka Timur memiliki potensi sumber daya alam sebagai daya tarik bagi investasi disektor-sektor produktif. Untuk mendorong pengembangan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kolaka Timur dibutuhkan adanya dukungan pengembangan infrastruktur wilayah guna menciptakan konektivitas kawasan dalam rangka pemerataan daya ungkit kawasan, multiplier effect kawasan berdasarkan potensi kawasan dari kawasan satu kekawasan lainnya. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- (1) Pemerataan ruas-ruas jalan dan jembatan yang menghubungkan antara kawasan pelayanan utama Ibu Kota Kabupaten, sub. kawasan pelayanan wilayah Kecamatan serta sub-sub pelayanan ditingkat Desa dan Kelurahan belum optimal.
- (2) Pembangun system pelayanan transportasi antar Moda pelayanan Utama, dan sub pelayanan di kecamatan serta sub-sub pelayanan di desa/kelurahan belum optimal.

- (3) Pelayanan infrastruktur dasar perkotaan dan perdesaan terkait dengan sarana air bersih, sanitasi, drainase, pengendalian lingkungan, penataan dan penyediaan perumahan dan permukiman, serta pengendalian sumber cadangan air baku dan pengendalian banjir kawasan pertanian, permukiman belum berjalan maksimal.
- (4) Pemerataan pelayanan penerangan listrik di kawasan-kawasan perumahan dan permukiman hingga sampai pelosok desa terpencil belum maksimal.
- (5) Pemerataan cakupan pelayanan pengairan di sentra-sentra produksi pertanian dan perkebunan masih belum maksimal.

2.3.1.4.1 Tata Ruang Wilayah

Laju pertumbuhan penduduk mengakibatkan kebutuhan ruang terutama lahan terbangun semakin besar, yang akan menjadi pemicu terjadinya konversi lahan dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun.

Kondisi ini adalah permasalahan yang kerap terjadi seiring dengan tingginya aktifitas sosial ekonomi masyarakat yang menyebabkan kebutuhan penduduk akan ruang, khususnya untuk permukiman dan aktifitas ekonomi yang semakin luas.

Sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Kolaka Timur, telah diatur dan ditetapkan dalam struktur dan pola ruang untuk kurun waktu 35 tahun mendatang. Permasalahan saat ini adalah terdapat pembangunan yang mulai tidak mengikuti arahan RTRW, sehingga alih fungsi lahan terjadi.

2.3.1.5 Permasalahan Lingkungan

Permasalahan lingkungan adalah permasalahan global, yang semakin memburuk seiring dengan pertumbuhan dan pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan. Permasalahan pencemaran udara, permasalahan sanitasi dan pencemaran air tanah adalah beberapa permasalahan yang berhubungan dengan masalah lingkungan.

1) Sampah

Sebagaimana daerah lain pada umumnya, sampah masih menjadi permasalahan lingkungan di Kabupaten Kolaka Timur yang tidak bisa diabaikan. Sampah yang tidak ditangani dengan baik, akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan menjadi sumber penyakit.

Pengelolaan sampah belum maksimal dikarenakan sarana dan prasana di TPA belum memadai dalam memenuhi syarat pengelolaan sampah pada umumnya.

2) Air Limbah

Air Limbah adalah sisa dari hasil usaha dan atau kegiatan masyarakat dan rumah tangga, juga yang berasal dari industri, air permukaan, air tanah serta buangan lainnya atau air buangan yang bersifat kotoran umum dan berwujud cair. Limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah.

3) Jambanisasi

Jumlah rumah tangga yang memiliki jamban di Kabupaten Kolaka Timur belum merata khususnya di daerah terpencil, ada di beberapa kecamatan yang desanya dilewati sungai besar sehingga masyarakat lebih memilih membuang air besar disungai tersebut yang dampaknya bisa mencemari air sungai.

4) Drainase

Permasalahan umum drainase di Kabupaten Kolaka Timur khususnya wilayah kota adalah terjadinya banjir dan air genangan. Banjir dan air genangan ditimbulkan oleh dua faktor yaitu faktor human (manusia) dan faktor alam. Faktor manusia meliputi faktor perilaku dimana masih banyak warga yang membuang sampah sembarang termasuk pada saluran drainase yang ada, membangun lahan yang bukan peruntukannya. Sistem dan pengelolaan merupakan bagian dari faktor ulah manusia yang meliputi kondisi drainase yang seringkali tidak berfungsi karena kurangnya pemeliharaan dan juga rancangan drainase tidak sesuai dengan kebutuhan. Faktor alam diantaranya faktor fisik alamiah dasar meliputi : perubahan iklim global, curah hujan diatas normal, morfologi dan topografi lahan, erosi dan sedimentasi dan faktor fisik ikutan/Lanjutan yang meliputi : pendangkalan/pengurangan volume aliran sungai, kerusakan drainase karena faktor alam dan lemahnya konstruksi.

5) Ruang Terbuka Hijau, Bencana Alam dan Masalah Kehutanan

Pengelolaan lingkungan Kabupaten Kolaka Timur sebagai Daerah Pemekaran baru terlihat belum ada gerakan yang signifikan secara terencana dan terprogram dalam pencegahan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau(RTH), namun dalam konteks pengembangan dan pembangunan wilayah Kabupaten Kolaka Timur dalam priode tahun 2021–2026 terkait dengan Program Jangka menengah Daerah (RPJMD) sudah harus menjadi salah satu program prioritas secara proporsional,namun dalam rencana pelaksanaan tersebut diperhadapkan permasalahan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan dan Pengendalian serta penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH),
- b. Pengendalian dan Pencegahan banjir dikawasan permukiman dan pertanian
- c. Pengendalian dan pencegahan rawan bencana pergeseran dan pergerakan tanah disekitar Kecamatan Uluwoi dan Ueesi.
- d. Pengendalian dan pengawasan serta pencegahan perambahan dan pengrusakan hutan.

2.3.1.6 Permasalahan Koperasi/UMKM dan Ketenagakerjaan

Permasalahan lingkungan adalah permasalahan global, yang semakin memburuk seiring dengan pertumbuhan dan pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan. Permasalahan pencemaran udara, permasalahan sanitasi dan pencemaran air tanah adalah beberapa permasalahan yang berhubungan dengan masalah lingkungan.

1. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

- Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur-jalur terhadap sumber-sumber permodalan;
- Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran);
- Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu;
- Kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil;
- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam berkoperasi;
- Manajemen usaha industri kecil dan home industri belum jelas dan belum baik;
- Kurang inovasi desain produk;
- Rendahnya akses pasar;
- Kurangnya modal usaha.

2. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

2.1 Ketenagakerjaan

- Rendahnya kualitas calon tenaga kerja, baik dari sisi pendidikan formal maupun keterampilannya sehingga posisi tawar menjadi rendah dan tidak mampu terserap di dunia kerja. Masih besarnya jumlah dan persentase angkatan kerja yang berpendidikan rendah mencerminkan masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang tersedia. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidak sesuaian kebutuhan di pasar kerja. Berkaitan dengan permasalahan ini, masih perlu dilakukan penyempurnaan pengembangan program-program pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan kerja. Keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana pelatihan, khususnya pada balai latihan kerja milik pemerintah, menyebabkan lembaga pelatihan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.
- Kebutuhan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja secara nasional menyebabkan banyak lembaga pelatihan, termasuk lembaga pelatihan milik Pemerintah, yang memberikan sertifikasi pekerja menggunakan standar yang berbeda-beda. Untuk itu, perlu adanya pengakuan dan komitmen bersama berkaitan dengan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja.
- Terbatasnya kesempatan kerja yang berawal dari rendahnya minat calon tenaga kerja untuk menciptakan lapangan kerja mulai dari kegiatan wirausaha. Padahal pemerintah menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu prioritas yang sangat mendesak untuk dapat menurunkan paling tidak setengah dari jumlah

pengangguran. Oleh karena itu, hal ini juga menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk dapat menggairahkan iklim berusaha baik itu melalui pemberian bantuan modal usaha kecil. Disamping itu pula pemerintah ditantang untuk menumbuhkan daya tarik bagi investor agar berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Semua ini bertujuan agar dapat membuka lapangan kerja baru. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang dapat memberikan iklim usaha yang kondusif. Iklim yang kondusif di sini berarti adanya stabilitas ekonomi, termasuk politik dan keamanan, serta biaya produksi yang rendah dan yang lebih penting lagi adanya kepastian hukum.

- Belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta hubungan industrial. Dalam upaya memperbaiki iklim ketenagakerjaan seharusnya kebijakan yang dibuat memperhatikan perlindungan tenaga kerja.

2.2 Transmigrasi

Salah satu strategi pengembangan wilayah Kabupaten Kolaka Timur adalah penempatan permukiman baru di Kecamatan Ueesi di Desa Tonggauna Kecamatan Ueesi, adapun permasalahan yang di hadapi adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan konektivitas melalui penyediaan infrastruktur wilayah dari kawasan pusat pelayanan kesub kawasan penempatan transmigrasi.
- b. Pembukaan lahan baru sector pertanian, perkebunan dan peternakan pada kawasan penempatan baru.

- c. Penyiapan lahan penempatan oleh Pemerintah Daerah baik untuk kebutuhan permukiman maupun lahan pertanian dan perkebunan.

2.3.1.7 Permasalahan Kondisi Perencanaan

Kabupaten Kolaka Timur sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) membutuhkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan sistematis secara hirarki berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyiapan dokumen perencanaan tersebut membutuhkan waktu dan tahapan, sumber daya manusia yang professional dan biaya, serta koordinasi secara horizontal dan vertikal.

2.3.1.8 Kependudukan

Berdasarkan Data Kabupaten Kolaka Timur dalam angka tahun 2020 bahwa laju pertumbuhan kependudukan Kabupaten Kolaka Timur tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan penyebaran penduduk di 12 (dua belas) Kecamatan Kabupaten Kolaka Timur dengan kepadatan penduduk pada tabel berikut

Tabel 2-38. Luas Wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kepadatan

Kecamatan	Luas Area	Penduduk	Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)
Aere	138,35	6,92	62
Lambandia	133	15,95	175
Poli-Polia	133,53	9,22	86
Dangia	172,72	7,17	52
Ladongi	122,88	14,67	148
Loea	107,94	5,88	68
Tirawuta	206,8	14,04	84
Lalolae	75,39	3,73	61
Mowewe	155,29	7,18	57
Tinondo	261,13	7,50	36
Uluwoi	712,39	4,39	8
Ueesi	1435,32	3,36	3
Kolaka Timur	3.654,74	100,00	34

Sumber: Kolaka Timur Dalam Angka Tahun 2020

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa persebaran penduduk yang tidak merata sehingga dibutuhkan kebijakan pengendalian penduduk dilihat dari pemanfaatan ruang, dengan menggunakan pola pendekatan Kawasan yang didorong pengembangannya.

Adapun arahan kebijakan dimaksudkan bahwa pembangunan wilayah Kabupaten Kolaka Timur dilihat dari persebaran penduduk diharapkan tetap dalam keseimbangan yang berdampak pada sebagai berikut:

1. Menghindari adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan permukiman.
2. Menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang terkait dengan lahan pertanian dan permukiman masyarakat.
3. Menciptakan terjadinya *multiplier effect* dan daya ungkit ekonomi wilayah terhadap seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Timur.

2.3.1.9 Ketahanan Pangan/Pertanian

Pengertian ketahanan pangan yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1996 yang dapat diartikan kondisi pangan dalam setiap rumah tangga yang terpenuhi dengan adanya pangan yang tercukupi serta aman untuk dikonsumsi, merata keseluruh rakyat dan terjangkau bagi setiap lapisan masyarakat secara menyeluruh. Meskipun pengertian ketahanan pangan beraneka macam tetapi inti dari setiap pengertian adalah tercukupi/terpenuhinya pangan.

Dilihat luasan penggunaan lahan pertanian Kabupaten Kolaka Timur sangat berpotensi untuk dikembangkan, namun khusus persawahan kab. kolaka timur perlu meningkatkan nilai produksi untuk memenuhi pangsa pasar, sebagai gambaran produksi sebesar 101.164,90 ton pada tahun 2019 diharapkan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat Kab. Kolaka Timur . Dalam pengembangan penggunaan lahan persawahan dan perkebunan mendapatkan beberapa kendala yang menyebabkan nilai produksi kurang dari Kabupaten lainya yaitu sebagai berikut

1. Sistem Irigasi yang belum optimal mengairi ke seluruh wilayah kawasan persawahan di Kabupaten Kolaka Timur
2. Peningkatan produksi dan produksifitas lahan
3. Optimalisasi saprodi
4. Sarana dan Prasarana pasca panen.
5. Perlindungan harga hasil pertanian di tingkat petani
6. Permodalan petani penggarap lahan pertanian
7. Keterampilan petani yang masih rendah
8. Sistem Transportasi dan konektivitas kawasan produksi
9. Kondisi Tanaman perkebunan kakao yang sudah tua
10. Harga jual yang relatif rendah pada petani

2.3.1.10 Pemerintahan

2.3.1.10.1 Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Timur/ Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Pelaksanaan pelayanan pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagai Kabupaten Otonomi baru, diperhadapkan berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas.
2. Penyediaan Perda-perda Pelayanan terhadap masyarakat yang memadai;
3. Pengukuran akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
4. Meningkatkan Standart Pelayan Masyarakat (SPM)

2.3.1.11 Permukiman dan Perumahan Rakyat.

Seiring dengan perkembangan sosial politik yang ada dan tuntutan perubahan dalam paradigma penyelenggaraan pembangunan nasional, serta dalam upaya menjawab tantangan dan agenda kedepan dibidang perumahan dan permukiman, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP) yang ada.

Pelaksanaan kebijakan perumahan dan permukiman Kabupaten Kolaka Timur Arahkan kebijakan pembangunan perumahan dan perumahan rakyat Kabupaten Kolaka Timur diarahkan sebagai berikut :

1. Penataan perumahan dan permukiman yang eksisting baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan;

2. Pengembangan perumahan dan permukiman pada kawasan pengembangan permukiman baru baik di pusat pelayanan utama maupun di subpelayanan di tingkat kecamatan dan kelurahan/perdesaan;
3. Pengembangan permukiman baru untuk penempatan transmigrasi di Kecamatan Uluiwoi dan Kecamatan Ueesi;
4. Pengembangan dan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan dan perdesaan;
5. Pengembangan pelayanan penerangan listrik perdesaan dan perkotaan.

Untuk mendorong pencapaian arahan kebijakan tersebut maka permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Belum tersedianya dokumen perencanaan yang mendukung seperti RTR Kawasan Strategis Kabupaten, RDTR Kawasan Perkotaan cepat tumbuh dan di tindak lanjuti dengan dokumen perencanaan turunannya seperti RTBL, dan RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman);
2. Konektivitas infrastruktur antara kawasan permukiman dan perumahan rakyat;
3. Daya tarik pengembangan perumahan dan permukiman oleh swasta masih rendah;
4. Ketersediaan lahan pengembangan perumahan dan permukiman rakyat;

2.3.1.12 Perikanan Air Tawar

Sebagaimana diketahui Kabupaten Kolaka Timur adalah Kabupaten yang satu-satunya di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak mempunyai perairan laut, sehingga berbicara pengembangan bidang perikanan di Kabupaten Kolaka Timur hanya terfokus pada pengembangan perikanan air tawar. Adapun potensi pengembangan air tawar yang ada di Kabupaten Kolaka Timur meliputi sebagai berikut:

1. Kabupaten Kolaka Timur berbatasan langsung dengan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai bahkan terdapat beberapa desa yang masuk pada kawasan Nasional tersebut sehingga berpotensi pengembangan wisata pancing perikanan ikan tawar seperti (Ikan Gabus, Ikan Nila, Ikan Mujair, dan beberapa jenis air tawar lainnya);
2. Kabupaten Kolaka Timur mempunyai Rawa Tinondo sehingga berpotensi pengembangan wisata pancing ikan air tawar dengan Ikan Gabus, Ikan Nila, Ikan Mujair, Ikan Lele, Ikan Sidat, Ikan Tawes dan jenis ikan air tawar lainnya;
3. Kabupaten Kolaka Timur dilewati sungai besar yaitu DAS Sungai Konaweaha di Kecamatan Uluwoi dan Kecamatan Ueesi sehingga berpotensi pengembangan Kawasan Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT).
4. Pengembangan Lobster air tawar di kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur.

Untuk mendorong terselenggaranya pelaksanaan pengembangan perikanan air tawar tersebut permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Pengetahuan masyarakat petani tentang potensi pengembangan perikanan air tawar belum optimal;

2. Kebijakan dan dorongan pemerintah daerah terhadap pengembangan perikanan air tawar dioptimalkan;
3. Pengembangan bibit unggul melalui BBI belum terlaksana optimal.

2.3.1.13 Pariwisata dan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan kekuatan pembangunan. Kebudayaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat yang bisa melibatkan lintas pemangku ke pentingan untuk bisa bersatu menjadi potensi kekuatan pembangunan. Kabupaten Kolaka Timur memiliki beragam kebudayaan yang bisa dikembangkan. peluang dan tantangan bagi pengembangan pariwisata akan mengalami hambatan terhadap modernisasi dan kearifan lokal, yang keduanya harus berjalan seiring dalam membentuk kehidupan masyarakat.

Namun demikian, pembangunan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Kolaka Timur menghadapi berbagai permasalahan, yakni :

- a. Pengelolaan bangunan cagar budaya sebagai catatan perkembangan sejarah belum maksimal;
- b. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan dengan sektor lain misalnya sinergi dengan pariwisata belum optimal;
- c. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola cagar budaya dan budaya lokal, dan belum optimalnya jejaring kerja dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
- d. Pembangunan infrastruktur di lokasi destinasi wisata yang berpotensi mendatangkan turis domestic dan mancanegara belum memadai.

2.3.1.14 Investasi

Sektor pertanian menjadi kontributor terbesar bagi produktivitas ekonomi daerah dan menjadi sektor andalan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka Timur. Ada permasalahan dalam pengembangan investasi di bidang pertanian mencakup, antara lain :

- a. Belum optimalnya pengembangan nilai tambah komoditas melalui mekanisme agroindustri;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana teknologi pertanian baik pada proses tanam maupun pasca panen, jaring pemasaran dan permodalan;
- c. Adanya ketidakseimbangan biaya produksi pertanian dan nilai jual komoditas akibat rente ekonomi;
- d. Tidak adanya jaminan harga komoditas dari pemerintah kecuali padi;
- e. Kondisi infrastruktur jalan kesentra produksi belum memadai;
- f. Belum optimalnya penggunaan pasca panen;
- g. Adanya perubahan iklim global yang tidak menentu berdampak pada keberlanjutan produksi komoditas pertanian.

Keberadaan Koperasidan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) menjadi penopang perekonomian daerah. Kelompok usaha ini menjadi katup pengaman pada saat bangsa ini dalam keadaan krisis ekonomi. Sektor UMKM merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. UMKM menjadi sektor penyerap tenaga kerja yang paling banyak. Sektor ini pula yang membentuk wirausaha. Namun, pembangunan UMKM belum mendapat perhatian serius. Ada beberapa permasalahan dalam pembangunan UMKM, yakni keterbatasan kemampuan sumber daya manusia pengelola UMKM; terbatasnya jaring kerja, pemasaran, permodalan, dan peralatan.

Sementara, perindustrian dan perdagangan menghadapi permasalahan yakni :

- a. Keberlanjutan dan ketersediaan bahan baku industri unggulan;
- b. Daya saing produk industri dan perdagangan masih rendah;
- c. Belum optimalnya jejaring kerjasama, pemasaran dan promosi;
- d. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana perdagangan;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengawasan dan perlindungan konsumen.

2.3.1.15 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk permasalahan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten kolaka timur sebagai berikut :

1. Keterlibatan perempuan dalam organisasi lembaga pemerintah dan swasta
2. Penjaminan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak
3. Memperkuat sumber daya manusia serta fasilitas/sarana dan penegakan hukum untuk penanggulangan kekerasan terhadap anak.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Memperhatikan perkembangan dari realisasi sasaran pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur tahun terakhir. maka upaya yang dapat direspon atas perkembangan tersebut adalah sebagai berikut :

I. URUSAN WAJIB

I.I Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan dan Olahraga

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Kolaka Timur adalah:

1. Masih rendahnya tingkat partisipasi sekolah anak usia dini (PAUD) anak usia 5-6 tahun.
2. Rendahnya jumlah satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi.
3. Masih terdapat angka putus sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) anak usia 7-12 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak usia 13-15 sehingga angka partisipasi sekolah belum mencapai 100%.
4. Persentase guru tersertifikasi belum mencapai 100%.
5. Angka akreditasi dengan kategori Grade A masih kurang.
6. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Kolaka Timur pada skala 7 tahun.
7. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, seperti Ruang UKS, Laboratorium, Ruang Perpustakaan, Ruang Guru, Ruang Keterampilan.
8. Masih terdapat bangunan pendidikan yang membutuhkan rehabilitasi/perbaikan.
9. Kurangnya fasilitas dan sarana olahraga di sekolah.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga terus mengupayakan berbagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada diantaranya:

1. Melakukan intervensi pada Lembaga-lembaga PAUD Desa/Kelurahan serta melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan PAUD kepada masyarakat

2. Melakukan peningkatan mutu pendidikan PAUD, melengkapi sarana dan prasarana serta meningkatkan kompetensi pendidik PAUD
3. Melakukan penelurusan persoalan putus sekolah serta menyediakan program intervensi seperti bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat rentan
4. Melakukan pelatihan bagi guru-guru yang belum memiliki sertifikasi pendidik
5. Melakukan pemetaan sekolah potensial dan menetapkan pilot project bagi sekolah potensial agar memenuhi syarat-syarat dalam mencapai akreditasi grade A
6. Melakukan sensus tingkat pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur dan sekaligus mengembangkan pendidikan luar sekolah melalui SKB/PKBM
7. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah
8. Melakukan perbaikan/rehabilitasi sarana pendidikan yang kurang layak
9. Menyediakan fasilitas dan sarana olahraga di sekolah

2) Kesehatan

Adapun beberapa permasalahan yang didapatkan selama tahun 2020 yakni :

1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu
2. Masih tingginya Angka Kematian Bayi
3. Prevalensi Stunting dan gizi buruk

4. Masih kurang optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi
5. Masih belum optimalnya penanganan stunting
6. Masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan kesehatan serta SDM tenaga kesehatan
7. Masih rendah perilaku hidup bersih dan sehat
8. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit masih kurang
9. Kompetensi nakes sebagai programer dalam bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit belum sesuai dan memadai
10. Sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan penyakit belum memadai
11. Edukasi tentang penyakit masih belum merata dan memadai
12. Jejaring lintas sektor dalam mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit masih rendah
13. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Kualitas dan kuantitas SDM kesehatan berdasarkan spesifikasi profesi masih kurang
14. Penataan pelayanan masih belum maksimal sesuai standar akreditasi Faskes
15. Sarana penunjang pelayanan medis belum maksimal
16. Belum maksimalnya peran serta lintas sektor lainnya dalam penanganan masalah kesehatan
17. Pembangunan Bidang Kesehatan belum maksimal sesuai SPM Bidang Kesehatan

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, maka solusi yang akan dilaksanakan sebagai rencana penanganan yaitu :

1. Peningkatan kapasitas tenaga bidan dalam pelayanan KIA
2. Koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor dalam penanganan stunting
3. Sosialisasi pemanfaatan rumah tunggu kelahiran
4. Sosialisasi PHBS di masyarakat dan di sekolah
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dari berbagai sumber dana
6. Melibatkan lintas sektor dalam berbagai kegiatan kesehatan khususnya pencegahan penyakit
7. Pelatihan SDM diperbanyak dengan berbagai metodologi, Pergantian antar programer dikurangi
8. Peran kader kesehatan ditingkatkan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit
9. Meningkatkan kegiatan penyuluhan dengan melibatkan berbagai sektor
10. Pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di setiap Faskes dengan merata sesuai amanat Permenkes 43 tahun 2019 dan standar akreditasi Faskes
11. Merencanakan dan memprioritaskan pembangunan Faskes secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan ruangan sesuai standar faskes Primer
12. Pemenuhan prasarana, alat kesehatan, Obat dan penunjang lainnya sesuai data ASPAK
13. Peningkatan Sinergitas peran lintas sektoral dan masyarakat secara bersama - sama menuju status kesehatan yang lebih baik
14. Evaluasi dan kolaborasi berbagai sektor pendukung capaian dan target pembangunan bidang kesehatan mulai

dari Perencanaan, Proses, Output dan out come perlu di tingkatkan

3) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur secara umum terlaksana dengan baik, namun ada beberapa kegiatan tidak bisa berjalan dengan baik dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan seperti kegiatan Akreditasi RSUD Kabupaten Kolaka Timur di karenakan masih dalam kondisi pandemi Covid 19.

4) Pekerjaan Umum. Penataan Ruang dan Perhubungan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2020, adalah:

1. Masih adanya keterlambatan penyelesaian kegiatan dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak.
2. kekeliruan penentuan kode rekening pada saat pencairan anggaran kegiatan fisik.

Sedangkan solusi dari permasalahan tersebut yakni:

1. Melakukan cco dengan pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan disertai denda keterlambatan.
2. Melakukan perbaikan kode rekening kegiatan yang mengalami kekeliruan.

5) Penanggulangan Bencana Daerah

Belum adanya database dan peta rawan bencana menjadi hambatan dalam pembuatan dokumen ataupun merencanakan kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan mitigasi bencana. Terkait permasalahan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2020 menggunakan pola kejadian bencana dan tabel kejadian bencana yang dimiliki oleh bidang kedaruratan bencana sambil menunggu penyusunan dokumen database dan peta rawan bencana Kabupaten Kolaka Timur.

6) Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2020, adalah:

1. Kendala administratif, seperti perubahan pengelola kegiatan, kendala waktu pelaksanaan dan koordinasi.
2. Ketersediaan listrik belum mencapai target yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara menyeluruh.

Sedangkan solusi dari permasalahan tersebut yakni:

1. Memaksimalkan sarana prasarana perkantoran yang ada, peningkatan kualitas ketertiban administrasi kegiatan.
2. Melakukan pengusulan kepada pihak pemerintah provinsi atau pemerintah pusat agar memberikan bantuan terkait penyediaan kebutuhan listrik bagi masyarakat yang belum tersentuh akses listrik.

7) Satuan Polisi Pamong Praja

Secara umum realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan polisi pamong praja kabupaten kolaka timur sangat baik, hal ini terlihat dari realisasi anggaran yang mencapai Rp3.272.005.385 atau sebesar 99,24% dari anggaran sebesar Rp3.296.928.500. Namun dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan, terdapat kendala/permasalahan yang ditemui sehingga serapan anggaran tidak mencapai 100%. Adapun permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Dalam pelaksanaannya belanja jasa penyediaan air dari anggaran Rp12.000.000 direalisasikan sebesar Rp10.132.750 hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah pemakaian air.

Solusi : kedepan Formula perhitungan Jumlah pemakaian harus lebih baik lagi.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Adminstrasi Perkantoran. Dalam pelaksanaannya belanja Penyediaan Jasa Adminstrasi Perkantoran dari anggaran Rp121.100.000 direalisasikan sebesar Rp117.100.000 hal ini disebabkan oleh Pengunduran diri seorang staf administrasi menjelang akhir tahun.

Solusi : lebih selektif lagi dalam penerimaan tenaga administrasi.

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Dalam pelaksanaannya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dari anggaran Rp194.750.000 direalisasikan sebesar

Rp193.404.500 hal ini disebabkan oleh tidak adanya permasalahan yang terjadi pada kendaraan dinas/operasional.

Solusi : Formula Perhitungan Pemeliharaan Rutin kendaraan dinas/opersional harus lebih baik lagi.

4. Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Dalam pelaksanaannya Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dari anggaran Rp2.288.050.000 direalisasikan sebesar Rp2.270.493.000 hal ini disebabkan oleh adanya kekurangan personel Tenaga pengendali pada awal tahun anggaran 2020.

Solusi : Penambahan personel Tenaga Pengendali.

8) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Badan Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2020 :

1. Kurangnya kesadaran beberapa Ormas dan LSM mendaftarkan/melaporkan keberadaannya di wilayah Kolaka Timur dan alamat yang berpindah-pindah tidak dilaporkan.
2. Kurangnya pemahaman pengurus partai untuk melaporkan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai.

Solusi yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Sosialisasi UU No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan pendataan keberadaan organisasi/LSM.

2. Bimtek bagi bendahara partai tentang tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.

9) Sosial

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2020, adalah :

1. Pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat miskin yang masih kurang.
2. Pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial yang masih kurang
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum valid secara keseluruhan
4. Keterbatasan pendampingan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
5. Keterbatasan SDM dan partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
6. Penanganan terhadap bencana yang belum responsif
7. Masih kurangnya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
8. Belum terbentuknya Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) di Desa dan Kelurahan.

Dari permasalahan tersebut Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur telah melaksanakan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut yakni:

1. Melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur pekerja sosial dan kelembagaan di Dinas Sosial.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, termasuk

keterjangkauan pelayanan sosial bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

I.II Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) *Ketenagakerjaan dan Transmigrasi*

Masih minimnya fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan kenagakerjaan di Kabupaten Kolaka Timur merupakan Kendala tersediri dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. Untuk Mengatasi permasalahan tersebut pemerintah terus melakukan perbaikan infrastruktur penunjang ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dan terus berupaya meningkatkan SDM penyelenggara pemerintahan khususnya bidang Ketenagakerjaan dan transmigrasi.

2) *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Pada tahun 2020 kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Timur terutama kegiatan rapat/sosialisasi mengalami penyesuaian dan refocusing anggaran sebagai dampak dari pandemi Covid 19, sehingga secara langsung mengurangi capaian kinerja OPD secara keseluruhan.

3) *Pangan*

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2020, adalah :

1. Belum Terpenuhinya Tenaga Teknis yang membidangi Ketahanan Pangan.
2. Mekanisme dan tata hubungan kerja penyelenggara kegiatan ketahanan pangan diberbagai tingkatan belum

tertata dengan baik sehingga belum terintegrasi dengan baik.

Sedangkan langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni :

1. Pengawasan dan pendampingan penyelenggaraan Kegiatan Ketahanan Pangan.
2. Mempersiapkan, memfasilitasi penyelenggaraan diseminasi/ sosialisasi kebijakan Ketahanan Pangan dan informasi program bidang ketahanan pangan.

4) Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Timur tahun 2020, permasalahan yang dihadapi yaitu ada kegiatan yang menunjang Tupoksi tetapi tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Sehingga dalam penganggaran tahun berikutnya kegiatan tersebut menjadi prioritas untuk dilaksanakan yang nantinya dapat mendukung pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Timur.

5) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya :

1. Pelayanan administrasi kependudukan jemput bola di Desa/Kelurahan belum berjalan maksimal karena adanya pandemi covid 19.
2. Keterbatasan petugas yang mampu mengoperasikan perangkat teknologi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

3. Perangkat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sering mengalami gangguan/kerusakan karena usia perangkat diatas 5 tahun sehingga menghambat penerbitan dokumen kependudukan.

Menyikapi permasalahan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur telah mengambil langkah-langkah seperti:

1. Memaksimalkan pelayanan administrasi kependudukan di tempat/kantor dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
2. Berupaya meningkatkan kemampuan SDM melalui kegiatan bimbingan teknis/pelatihan tetapi masih terkendala pandemi Covid 19.
3. Terkait perangkat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang sudah mencapai 5 tahun sedang diusahakan untuk dilakukan pembaharuan perangkat.

6) *Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

Beberapa kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a) Dengan adanya Pandemi COVID – 19 membuat anggaran beberapa kegiatan teknis harus di refocusing dan di saving sehingga mengakibatkan menurunnya kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b) Rendahnya Sumberdaya Manusia dan Kurangnya personil yang tersedia sehingga setiap personil harus rangkap pekerjaan yang dapat menghambat terselesaikannya pekerjaan. Oleh karena itu dibutuhkan tambahan personil serta sumberdaya aparatur yang memadai dan mampu bekerja serta memahami tugas dan fungsi masing-masing.

- c) Adanya nomenklatur baru di DPMD sehingga ada Bidang yang tidak bisa terlaksana kegiatannya karena tidak tercantum dalam renstra. Namun di harapkan adanya cara lain yang bisa di laksanakan walaupun kegiatan tidak bisa di masukkan dalam perencanaan tapi ada cara lain setidaknya ada yang tersampaikan untuk sasaran kegiatan tersebut.

7) *Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kolaka Timur terdapat beberapa permasalahan yaitu :

1. Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata
2. Tingkat partisipasi KB masih rendah
3. Petugas Keluarga Berencana masih kurang
4. Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) belum optimal
5. Kepesertaan pasangan usia subur tidak ber-KB cukup tinggi
6. Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga belum optimal

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus semakin meningkatkan sosialisasi guna peningkatan pemahaman pentingnya kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana sehingga nantinya dapat terus meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti program KB. Selain itu perlu juga menambah petugas Keluarga Berencana untuk semakin mengembangkan advokasi dan komunikasi, informasi

dan edukasi sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

8) *Informatika dan Persandian*

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2020, adalah :

1. Pengembangan jaringan intergrasi ke tingkat kecamatan masih terkendala.
2. Kurangnya sdm bidang programmer yang dapat melakukan pengembangan aplikasi yang telah ada di beberapa OPD.

Sedangkan solusi dari permasalahan tersebut yakni :

1. Dibutuhkan dukungan APBD untuk melakukan pengembangan integrasi sampai ke tingkat kecamatan.
2. Penambahan tenaga ahli programmer dan pengembangan SDM melalui pelatihan dan bimtek.

9) *Penanaman Modal Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)*

Permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam menghadapi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur di tahun 2020 dan solusi penyelesaian permasalahan, dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Belum Optimalnya Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Parasarana Daerah

Belum Optimalnya Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana terlihat pada tidak tercapainya realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020. Di tahun 2020, Target PAD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka

Timur sebesar Rp300.000.000,00 di bidang Pendapatan Retribusi Daerah IMB (Izin Mendirikan Bangunan), dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp149.947.115,00 (per Tanggal 13 Desember 2020) atau sekitar 49,98 %. Tidak terpenuhinya target PAD DPMPTSP Kabupaten Kolaka Timur di tahun 2020 ada beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :

- Kurangnya kesadaran masyarakat terkait betapa pentingnya izin dalam menjalankan usaha sehingga perlu diadakan sosialisasi perizinan tiap tahun.
- Belum Tersedianya Mobil keliling untuk pelayanan perizinan. Ini perlu karna sebagian besar masyarakat masih membutuhkan pelayanan perizinan di lapangan. Pelaku usaha kebanyakan lebih memilih diuruskan langsung daripada mau berurusan langsung ke kantor DPMPTSP Kabupaten kolaka Timur.
- Perlu dikaji ulang dalam Peraturan Daerah (PerDa) dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (PerBup) Tentang Penetapan Tarif Retribusi IMB. Tarif retribusi IMB Kolaka Timur tergolong rendah dibanding kabupaten lain, maka perlu diadakan kajian penetapan tarif retribusi IMB.
- Garis sempadan jadan menjadi faktor penghambat dimana seperti jalan nasional sempadan 25 meter dari tengah jalan ke badan rumah, maka perlu disesuaikan dengan kondisi di Kolaka Timur.
- Kepemilikan sertifikat yang menjadi salah satu syarat pengurusan izin juga menjadi faktor penghambat. Dimana kebanyakan masyarakat bermohon IMB tetapi belum memiliki sertifikat Hak Milik, sehingga perlu diberikan kebijakan cukup dengan SKT (Surat Keterangan Tanah) dan Akta Jual Beli Tanah.

- Masyarakat kebanyakan mau didatangi petugas/pegawai perizinan untuk mengurus izinnya, sehingga kalo tidak ada petugas yang datang masyarakat tidak akan mengurus izin. Dan ini tentu saja bertentangan dengan SOP pelayanan perizinan, dimana pemohon izin atau pelaku usaha harus mengurus izinnya langsung ke kantor DPMPTSP, sesuai instruksi KPK untuk menghindari pungli (pungutan liar).
- Belum tersedianya mall pelayanan publik
- Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan lingkup DPMPTSP belum memadai.

Oleh karena itu pada tahun mendatang program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Parasarana Daerah perlu mendapat perhatian yang serius agar meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, sehingga jumlah izin yang dikeluarkan dalam 1 (satu) tahun dapat meningkat sehingga target PAD DPMPTSP Kabupaten Kolaka Timur Tercapai di tahun 2020 dan tahun mendatang.

b) Anggaran

Terbatasnya anggaran DPMPTSP Kabupaten Kolaka Timur sehingga masih banyak kegiatan dan pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor yang tidak terakomodir

c) Faktor Bencana Nasional Non Alam (Covid 19)

Kinerja perizinan terpengaruh oleh adanya wabah covid 19, dilihat dari jumlah izin tahun 2020 sebanyak 160 izin, kondisi tersebut dibandingkan dengan rata-rata realisasi izin tahun 2019 sebanyak 189 izin, sehingga mengalami penurunan sebesar 30,98%.

10) Perpustakaan & Kearsipan

Pelaksanaan Urusan kearsipan dapat dilaksanakan dengan baik pada tahun 2020, namun perlu adanya Perpustakaan Umum Daerah yang dilengkapi bahan bacaan yang memadai untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

II. URUSAN PILIHAN

1) Pertanian

Dalam pelaksanaan urusan Pertanian oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Timur tahun 2020 secara umum dapat terlaksana dengan baik, tapi terdapat beberapa permasalahan diantaranya beberapa kegiatan penyuluhan dan peningkatan kapasitas penyuluh anggarannya mengalami refocusing dan dialihkan untuk penanganan pandemi covid 19, hal tersebut tentunya mengakibatkan menurunnya capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan.

2) Perkebunan dan Hortikultura

Dalam pelaksanaan urusan Pertanian oleh Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Kolaka Timur tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik namun ada beberapa kegiatan yang anggarannya mengalami refocusing untuk penanganan pandemi Covid 19 diantaranya :

1. Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Petani dan Perjalanan Dinas Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatannya diringkas sehingga tidak bisa berjalan dengan maksimal

2. Pekan Nasional Petani dan Nelayan (PENAS) ke Sumatera Selatan Tidak Dilaksanakan
3. Pelaksanaan kegiatan sinkronisasi dana DAK yang seharusnya dilaksanakan dengan pertemuan secara langsung harus dilaksanakan melalui aplikasi zoom sehingga tidak bisa berjalan dengan maksimal.

3) Pariwisata

Pelaksanaan urusan pilihan Pariwisata tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala dalam upaya memajukan wisata daerah, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur penunjang terutama akses ketempat obyek wisata yang kurang memadai, untuk itu pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berupaya meningkatkan infrastruktur penunjang pengembangan pariwisata dan pengembangan objek pariwisata unggulan.

4) Perdagangan. Perindustrian. Koperasi dan UKM

Dalam pelaksanaan urusan Perdagangan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik namun kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah dengan anggaran Rp100.000.000,00 tidak dapat dilaksanakan akibat dampak pandemi Covid 19, sehingga mengakibatkan menurunnya serapan anggaran.

III. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

1) Sekretariat DPRD

Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan.

2) Sekretariat Daerah

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan yang oleh Sekretariat Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak ada permasalahan.

3) Perencanaan.

Kendala yang dihadapi Bappeda Litbang adalah belum terintegrasinya sistem e-planning dan sistem e-budgeting secara online sehingga menyulitkan dalam proses pengendalian kebijakan. Bappeda Litbang berupaya memaksimalnya penggunaan aplikasi SIPD dari Kemendagri yang telah terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran. Selain itu permasalahan lainnya belum bisa tersusunnya beberapa dokumen perencanaan dikarenakan keterbatasan anggaran sebagai akibat dari refocusing anggaran. Oleh karenanya dengan segala sumber daya yang ada Bappeda Litbang terus bekerja keras untuk menuntaskan beberapa dokumen diawal tahun berikutnya.

4) Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang keuangan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2020 terdapat faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan yakni beberapa kegiatan rapat/sosialisasi tidak dapat berjalan

dengan maksimal dikarenakan masih dalam kondisi pandemi covid 19, sehingga sangat berpengaruh terhadap serapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

5) Inspektorat

Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur tahun 2020 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Konsistensi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam Pelaksanaan Peta Pengawasan yang telah ditentukan masih diperlukan adanya koordinasi dan sinergitas dalam penyusunan peta pengawasan
2. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang rendah
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil-hasil pengawasan, sehingga diperlukan adanya ekspos hasil pengawasan demi terwujudnya transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah
4. Belum meratanya tingkat kompetensi teknis sumber daya manusia pengawasan, sehingga diperlukan adanya keikutsertaan aparat pengawas dalam berbagai diklat atau bimbingan teknis yang berkenan
5. Sistem dan Prosedur Kerja Pengawasan dan Standar Kendali Mutu belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga perlu adanya komitmen dari seluruh pegawai untuk menerapkannya disetiap penugasan
6. Kurangnya jumlah anggaran pelaksanaan pemeriksaan sehingga pelaksanaan pemeriksaan belum optimal.

Beberapa solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut yakni :

1. Pelatihan terhadap Perencana di tiap OPD dalam Menyusun daftar resiko di OPD nya masing – masing
2. Melibatkan IRBAN/Auditor untuk memantau Tindak Lanjut pada saat melakukan Audit terhadap Obrik pemeriksaan dan memastikan Obrik tersebut telah menindak lanjuti Rekomendasi dari Inspektorat maupun BPK
3. Adanya Ekspos Berjenjang :
 - Ekspos antara Tim Audit dengan Obrik yang dilakukan pada saat selesai melakukan Audit.
 - Ekspos Bersama Inspektur, Tim Pemeriksa dan Objek Pemeriksaan yang dilaksanakan di Kantor Inspektorat dan selanjutnya membuat Action Plan antara Tim Audit dan Obrik dimana pihak tersebut bersepakat untuk menindaklanjuti Rekomendasi selama 60 hari sejak LHP terbit.
4. Mengikuti Diklat, Bimtek dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten dalam meningkatkan kompetensi APIP (BPKP, dll), selain itu APIP dapat melakukan PKS dan Focus Group Discussion (FGD) untuk saling berbagi pengetahuan diharapkan output dari kegiatan tersebut terjadi pemertaan Kompetensi diantara APIP.
5. Agar semua APIP memahami Prosedur Audit dari tahap Perencanaan hingga tahap Pelaporan sehingga perlunya dilaksnakan PKS dan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyamakan persepsi diantara APIP

6. Tim TAPD harus memahami Tupoksi Inspektorat dan menerapkan Permendagri Nomor 33 tahun 2019.

6) *Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

Untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Kolaka Timur antara lain :

- a) Peningkatan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi dan bidangbidang lain yang terkait dengan mengirimkan ke dalam diklat – diklat guna peningkatan kualitas dan kompetensinya;
- b) Melakukan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan di bidangkepegawaian secara rutin dan berkelanjutan yang ditindak lanjuti dengan monitoring dan evaluasi secara intensif dan berkelanjutan pula;
- c) Mengusulkan penambahan SDM yang kompeten di bidangnya serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai;
- d) Meninjau ulang, mengevaluasi dan jika diperlukan melakukan revisi atau perbaikan terhadap dokumen perencanaan yang disusun sehingga dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan dalam pelaksanaannya yang berpotensi mengurangi kualitas hasil pekerjaan;
- e) Menggunakan pemecahan solusi dalam dokumen ini sebagai strategi mempertahankan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya;

- f) Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara rutin sebagai alat kendali dan umpan balik pencapaian target kinerja;
- g) Peningkatan koordinasi dan kerja sama untuk mengatasi masalah dengan prinsip saling dukung saling pengertian dan transparan.

Penyediaan data kepegawaian berbasis web agar dapat diakses dimana saja dan kapan saja.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Tahun 2022 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha, diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 serta mendorong sektor-sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi Covid-19 harus dilakukan bersamaan dengan agenda pemulihan ekonomi untuk itu pemerintah pusat akan kembali melanjutkan agenda reformasi struktural pada tahun 2022, diantaranya melalui Perbaikan iklim investasi, Reformasi kelembagaan, Peningkatan riset dan inovasi, Perluasan pembangunan infrastruktur dan Peningkatan kualitas SDM.

Arah Kebijakan dan strategi pembangunan Nasional tahun 2022 selanjutnya dituangkan kedalam tujuh Prioritas Nasional yang merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP tahun 2022 untuk menjaga kesinambungan pembangunan

serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Tujuh Program Nasional Rencana Kerja Pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menuju Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;
6. Memnangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukmankam Dan Tranformasi Pelayanan Publik;

Sedangkan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 berfokus pada :

1. Peningkatan Kualitas Hidup Dan Pemerataan Akses Terhadap Pelayanan Dasar;
2. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor-Sektor Unggulan;
3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Peningkatan Infrastruktur Dasar Dan Wilayah Untuk Mendukung Konektifitas;.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Daerah Kabupaten Kolaka Timur ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, mengimplementasikan program dan isu strategis daerah, serta sebagai pedoman dalam merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pada tahun pertama atau kondisi awal RPJMD Kabupaten Kolaka Timur, prioritas pembangunan jangka menengah Kabupaten Kolaka Timur difokuskan pada salah satu upaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah. Kondisi perekonomian daerah diharapkan dapat terus meningkat, dengan mendorong sektor-sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat pascapandemi Covid-19. Pertumbuhan PDRB sebagai indikator dari kondisi perekonomian daerah Kabupaten Kolaka Timur ditargetkan dapat tumbuh pada Tahun 2022 setelah mengalami minus pada tahun sebelumnya. Guna mencapai target sasaran pokok pembangunan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kolaka Timur untuk tahun 2022 adalah :

1. Peningkatan mutu pendidikan serta pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan dengan penekanan pada penguatan akhlak serta nilai-nilai budaya local;
2. Peningkatan jaminan kesehatan bagi warga miskin melalui mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan, peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui pengembangan puskesmas, pengembangan rumah sakit dan

- pemenuhan sumber daya manusia kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya;
3. Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan untuk pengembangan interkoneksi antar wilayah, pembangunan/Peningkatan sarana prasarana transportasi, irigasi, penyediaan air minum dan utilitas umum;
 4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan publik yang professionalism, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan berbasis SPM;
 5. Peningkatan/pembangunan sarana prasana infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor Industri, Pertanian, perkebunan, perikanan air tawar, pariwisata, Koperasi dan UMKM, Peningkatan produksi dan produktivitas melalui penyuluhan, sarana produksi, kelembagaan, dan pengolahan pasca panen;
 6. Pembangunan infrastruktur desa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat melalui bantuan stimulus dan partisipasi masyarakat;
 7. Menyelenggarakan kegiatan yang menyalurkan minat dan bakat pemuda dalam olahraga dan kesenian, melalui peningkatan/pembangunan sarana prasarana olahraga dan kesenian;
 8. Pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan bagi masyarakat, melalui peningkatan/pembangunan sarana prasarana destinasi pariwisata;

9. Peningkatan kelembagaan agama dan sosial masyarakat untuk mewujudkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama;
10. Pengendalian dan pemantauan resiko pencemaran pada air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati;

3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah serta sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Kolaka Timur mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fundamental ekonomi makro yang memburuk diakibatkan oleh pandemik Covic-19 sehingga mempengaruhi pertumbuhan kinerja perekonomian dan mengalami penurunan di tahun ini. Perkembangan sektor ekonomi berdampak langsung terhadap peningkatan PDRB dan nilai PDRB perkapita yang pada hakekatnya menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Salah satu indikator perekonomian maju adalah perekonomian yang outputnya sebagian besar komoditas olahan; yang berarti nilai tambah produk sudah semakin besar didapatkan oleh masyarakat lokal. Indikator ini telah

terjadi pada trend perekonomian Kabupaten Kolaka Timur dimana kontribusi sektor primer semakin mengecil sementara kontribusi sektor olahan sekunder maupun tersier semakin dominan.

Perekonomian Kabupaten Kolaka Timur dari tahun 2016 sampai tahun 2019 menggambarkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Kolaka Timur. Pertumbuhan terbesar pada tahun 2016 (7,40 persen), dan sebaliknya yang terkecil tahun 2019 (5,63 persen). Perlambatan laju pertumbuhan tahun 2019 sebagian besar disebabkan oleh stagnannya perekonomian pada sektor pertanian, transportasi, jasa perusahaan dan jasa pendidikan dimana sektor ini tidak sama sekali tumbuh bahkan nilainya negatif. Hal tersebut tentunya berdampak signifikan terhadap perekonomian di tahun berikutnya.

Tabel 3-1. Laju Pertumbuhan Riil PDRB atas dasar harga konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016-2020

LAPANGAN USAHA		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,47	5,39	6,37	4,91	-0,77
B	Pertambangan dan Penggalian	12,47	3,42	6,88	9,65	-4,41
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	9,91	7,21	0,12	0,04	-2,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,38	5,94	1,63	5,95	3,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,13	0,12	5,7	8,65	7,23
F	Konstruksi	13,82	3,69	6,99	9,65	-0,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,2	7,46	5,93	5,50	-2,00
H	Transportasi dan Pergudangan	10,18	4,35	9,04	5,17	-1,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,73	5,62	6,64	5,11	-3,81
J	Informasi dan Komunikasi	9,76	8,44	8,2	8,56	10,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,64	4,61	2,06	4,63	5,57
L	Real Estat	3,18	4,17	2,78	4,55	0,42
M,N	Jasa Perusahaan	10,17	5,98	5,22	2,35	-3,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,55	4,13	5,33	4,10	5,50
P	Jasa Pendidikan	10,98	3,13	6,59	1,27	6,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,25	3,21	5,86	4,86	0,79
R,S, T,U	Jasa lainnya	6,27	2,74	5,41	4,86	-3,00
Produk Domestik Regional Bruto		7,40	5,11	6,10	5,63	-0,31

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: Kolaka Timur Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku, pada tahun 2020, Perekonomian Kolaka Timur masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kontribusinya mencapai 42,49 persen, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 11,65 dan konstruksi 11,65 persen.

Tabel 3-2. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016-2020

LAPANGAN USAHA		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42,59	42,66	42,27	42,06	42,49
B	Pertambangan dan Penggalian	9,65	9,42	9,49	9,87	9,09
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3,27	3,39	3,23	3,08	3,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,18	0,17	0,16	0,17	0,18
F	Konstruksi	11,43	11,19	11,52	11,78	11,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,90	13,47	13,67	13,75	13,49
H	Transportasi dan Pergudangan	2,22	2,17	2,25	2,25	2,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47
J	Informasi dan Komunikasi	1,19	1,22	1,22	1,23	1,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,09	2,10	2,04	0,02	2,10
L	Real Estat	1,36	1,34	1,28	1,25	1,24
M,N	Jasa Perusahaan	0,20	0,21	0,21	0,20	0,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,25	6,13	6,13	6,02	6,43
P	Jasa Pendidikan	3,69	3,64	3,64	3,47	3,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,87	0,86	0,86	0,85	0,94
R,S, T,U	Jasa lainnya	1,60	1,55	1,53	1,50	1,48
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kolaka Timur Dalam Angka. Tahun 2021

3.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan di tahun sebelumnya untuk lepas dari tekanan dan mempercepat pemulihan dampak Covid-19, pembangunan di tahun 2022 ditujukan untuk memantapkan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi wilayah terdampak serta percepatan transformasi sosial ekonomi dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan kompetitif wilayah, serta percepatan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 sebesar 5,72% sesuai target RPJMD, pemerintah daerah optimis dengan mendorong sektor-sektor unggulan khususnya disektor pertanian sabagai penyanggah utama perekonomian Kabupaten Kolaka Timur disamping sektor unggulan lainnya seperti perdagangan besar dan eceran serta sektor konstruksi.

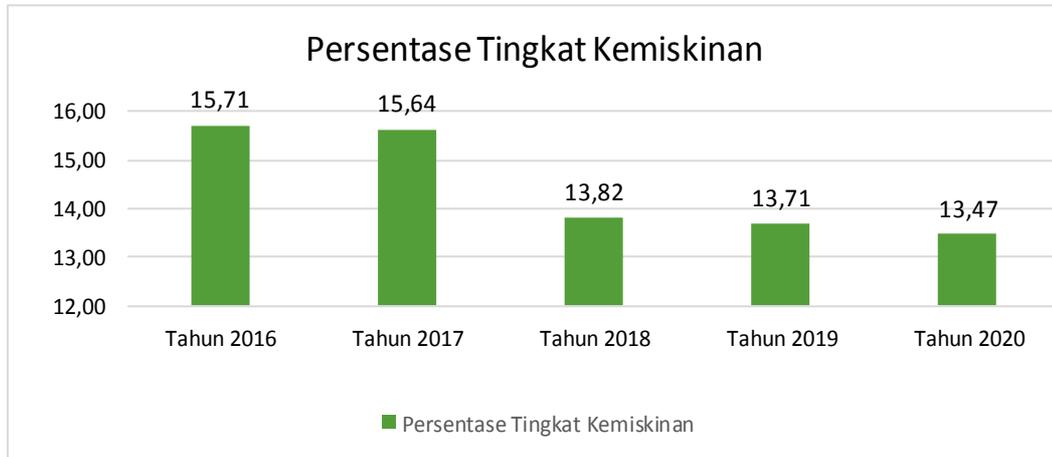
Beberapa asumsi yang akan menjadi pendorong perekonomian Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun 2022 adalah (1) peningkatan kinerja lapangan usaha utama, (2) peningkatan konsumsi rumah tangga, (3) peningkatan realisasi investasi, dan (4) meningkatnya pendapatan asli daerah.

3.1.1.3 Tingkat Kemiskinan

Dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basicneedsapproach*), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

Pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap aspek sosial dan ekonomi. Salah satu dampaknya adalah penurunan pengeluaran dan peningkatan pengangguran yang menyebabkan kenaikan angka kemiskinan. Persentase Penduduk miskin di Kabupaten Kolaka Timur sepanjang periode tahun 2016 - 2020 trendnya terus mengalami penurunan, Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebesar 15,71 persen dari total jumlah penduduk, menurun menjadi 15,74 persen pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2020 persentase tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten Kolaka Timur menurun menjadi 13,47 persen.

Tabel 3.3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kolaka Timur
Tahun 2016-2020



Sumber: Kolaka Timur Dalam Angka Tahun 2021

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin cepat, diperkirakan angka kemiskinan sesuai target RPJMD tahun 2021-2026 turun menjadi 13,40 persen pada tahun 2022. Kondisi ini diharapkan dapat terwujud melalui penguatan sektor-sektor ekonomi dan program-program pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan difokuskan di daerah perdesaan mengingat angka kemiskinan tertinggi di Kabupaten Kolaka Timur terjadi di daerah perdesaan.

3.1.1.4 Pengangguran

Tekanan pandemi Covid-19 pada perekonomian Nasional maupun Daerah menyebabkan tingkat pengangguran terbuka meningkat. Pada Tahun 2022 diprediksi tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kolaka Timur 3,15 persen dengan tetap optimis atas tren menurun dari tahun ketahun. Jika dilihat dari jenis kelamin jumlah pengangguran laki- laki lebih besar di bandingkan perempuan dan Pengangguran di Kabupaten Kolaka Timur sebesar 2.577 angkatan kerja sebesar 78,437. Penurunan angka pengangguran ini disebabkan oleh daya serap di sektor pertanian, konstruksi, perdagangan besar dan eceran meningkat sehingga daya serap tenaga kerja lebih tinggi.

Tabel 3.4 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas

Menurut Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kab. Kolaka Timur

KEGIATAN UTAMA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Angkatan Kerja	47.707	30.730	78.437
Bekerja	46.237	29.632	75.860
Pengangguran terbuka	1.470	1.107	2.577
Bukan Angkatan Kerja	4.690	17.849	22.539
Sekolah	2.060	2.836	4.896
Mengurus R Tangga	1.380	14.273	15.635
Lainnya	1.250	740	1.990
Jumlah Total	52.397	48.579	100.976

Sumber: Kolaka Timur Dalam Angka. Tahun 2021

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan 2021

3.1.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2020 dan 2021

Tantangan perekonomian daerah Kabupaten Kolaka Timur akan sangat dipengaruhi oleh Revocusing Anggaran DAU Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun 2021 untuk penanganan Covid-19, serta perkembangan sektor-sektor pada lapangan usaha yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi.

Sektor pertanian sebagai sektor yang mendominasi lapangan pekerjaan di Kabupaten Kolaka Timur mampu memberikan efek domino bagi sektor-sektor lain. Perkembangan positif pada sektor pertanian secara signifikan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong sektor ekonomi lain. Namun jika tidak didukung dengan intervensi dan kebijakan pemerintah, maka kebijakan ekonomi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka Timur.

Dari sisi produksi, sektor pertanian di Kabupaten Kolaka Timur berada kondisi yang baik. Namun dari berbagai aspek penunjukan sektor pertanian banyak yang perlu menjadi perhatian termasuk kesejahteraan petani dan stakeholder pertanian lainnya. Yang dimaksud stakeholder pertanian adalah segala pihak yang mengambil peran dan manfaat dari sektor pertanian, mulai disarankan dari aspek ketersediaan prasarana jalan jembatan yang memadai, prasarana/sarana pendidikan

dan kesehatan serta yang tidak kalah penting adalah prasarana/sarana pemerintahan sebagai elemen yang menegakkan regulasi dan fungsi manajerial pembangunan.

Terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 dan 2022, yaitu:

1. Belum pulihnya perekonomian global;
2. Harga beberapa komoditas unggulan yang masih belum membaik;
3. Faktor cuaca yang kurang kondusif berpengaruh terhadap distribusi pasokan bahan pangan;
4. Belum pulihnya daya beli masyarakat;
5. Pengangguran terbuka.
6. Dampak Pandemi Wabah Covid-19.

3.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

- 1) Kabupaten Kolaka Timur dikenal dengan daerah yang memiliki potensi sumber daya yang besar utamanya pada sector pertanian. Membaiknya perekonomian global dan nasional akan berpengaruh terhadap meningkatnya harga beberapa komoditi unggulan seperti cacao, lada, komoditi pangan serta hortikultura .
- 2) Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Kolaka Timur dapat menjadikan daya tarik bagi masuknya investasi, namun hal ini harus didukung oleh penciptaan iklim yang kondusif.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, aspek keuangan merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan maupun fungsi pelayanan, maka untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengelola administrasi keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya yaitu efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta memperhatikan asas-asas kepatutan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintahan Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada

salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalian Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada:

- a. Mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- b. Pembaruan data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah;

- c. Mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;
- d. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap menjaga agar tidak terjadi beban ekonomi yang memberatkan masyarakat.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas:

- a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut yang berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah;
- b) Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi;
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada Kabupaten/Kota, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dalam rangka melaksanakan Arah Kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan Revocusing Anggaran Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Covid-19 yang menjadi wabah pandemi di Indonesia, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur optimis memproyeksi Realisasi dan Target

Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran Tahun 2022 sama dengan Tahun Anggaran 2021 dengan mempertimbangkan kondisi pendapatan asli daerah dan kebutuhan daerah.

Tabel 3.5 Realisasi Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020

No.	Jenis Pendapatan Daerah	Realisasi Tahun 2020
1	2	4
4	PENDAPATAN	721.462.256.825,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	21.164.207.611,00
4.1.1	Pajak Daerah	5.401.783.029,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.743.943.965,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	6.957.607.955,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.060.872.662,00
4.2	DANA PERIMBANGAN	564.297.298.002,00
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32.270.810.812,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	383.189.558.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	122.043.239.190,00
4.2.4	Dana Insentif Daerah	26.793.690.000,00
4.3	Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah	136.000.751.212,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	22.667.970.000,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	16.650.615.212,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah Daerah Lainnya	00.00
4.3.6	Pendapatan Dana Desa	96.682.166.000,00

Tabel 3.6 Target Dan Pendanaan Daerah Kabupaten Kolaka Timur
Tahun Anggaran 2021-2022

Kode	Uraian	Tahun Berjalan 2021	Target Pendapatan 2022
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25.342.863.703	25.342.863.703
4.1.01	Pajak Daerah	4.777.997.337	4.777.997.337
4.1.02	Retribusi Daerah	1.688.000.000	1.688.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.960.460.810	6.960.460.810
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.916.405.556	11.916.405.556
4.2	Pendapatan Transfer	676.440.118.655	676.440.118.655
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	658.699.930.000	658.699.930.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.740.188.655	17.740.188.655
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	22.853.500.000	22.853.500.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22.853.500.000	22.853.500.000
	Jumlah Pendapatan	724.636.482.358	724.636.482.358
5	BELANJA		
5.1	Belanja Operasi	403.149.968.795	403.149.968.795
5.1.01	Belanja Pegawai	208.004.543.010	208.004.543.010
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.866.010.585	188.866.010.585
5.1.05	Belanja Hibah	4.929.415.200	4.929.415.200
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.350.000.000	1.350.000.000
5.2	Belanja Modal	186.214.718.063	186.214.718.063
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.158.120.000	3.158.120.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.620.376.780	32.620.376.780
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.219.758.727	43.219.758.727
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	106.351.462.556	106.351.462.556

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	865.000.000	865.000.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	139.271.795.500	139.271.795.500
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	139.271.795.500	139.271.795.500
	Jumlah Belanja	731.636.482.358	731.636.482.358
	Total Surplus/(Defisit)	(7.000.000.000)	(7.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000	10.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000	3.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	3.000.000.000
	Pembiayaan Netto	7.000.000.000	7.000.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0
	TOTAL APBD	734.636.482.358	734.636.482.358

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah Kabupaten Kolaka Timur, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah elemen penting yang perlu dioptimalkan peningkatan, diawasi pemungutannya, ditingkatkan kesejahteraan petugas dilapangan dan melakukan terobosan-terobasan pembangunan yang kreatif untuk memberi tambahan pendapatan bagi daerah.

Dalam memaksimalkan potensi daerah yang ada, kebijakan yang dapat dilaksanakan untuk mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah antara lain melalui:

- Perbaikan dan peningkatan sarana prasarana pos PAD;
- Penerapan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- Peningkatan efisiensi dan efektifitas pemungutan pendapatan pajak daerah hasil retribusi daerah melalui peningkatan pengawasan pemungutan;
- Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak dan retribusi daerah;
- Pengkajian ulang kelayakan atau realibilitas nilai penetapan subyek pajak daerah;
- Pendataan ulang subyek dan obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- Koordinasi secara sinergis dan terpadu dengan OPD penghasil dan/atau pemungut retribusi;
- Optimalisasi kinerja PDAM serta BUMD lainnya sehingga dapat berkontribusi lebih baik dalam peningkatan PAD;

- Melakukan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai peraturan daerah untuk penyesuaian terhadap perkembangan terkini.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisien penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kebijakan bidang belanja daerah pada hakekat merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien. Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Untuk tahun 2022 Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.. Kelompok belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan terkait : (1) belanja pegawai; (2) belanja barang dan jasa; (3) belanja hibah; (4) belanja bantuan bantuan sosial;. Sedangkan kelompok belanja Modal dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas: (1) belanja modal tanah; (2) belanja modal peralatan dan mesin; (3) belanja modal gedung dan

bangunan; (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; (5) Belanja Modal Aset Tetap.

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2022 Kab. Kolaka Timur memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain: belanja Operasi dan belanja Modal sedangkan pada pos belanja tidak terduga untuk mengantisipasi jika ada hal-hal yang bersifat kedaruratan. Dalam belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi OPD berdasarkan urusan dan bidang urusan, Pemerintahan Daerah memprioritaskan sebagai besar belanja pada belanja modal maupun barang jasa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi dampak dari pandemik Covic-19 di Kolaka Timur. Berikut komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung Kabupaten Kolaka Timur.

Tabel 3.7 Realisasi Belanja Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020

NO.	BELANJA	REALISASI TAHUN 2020
5	BELANJA	716.373.659.292,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	393.211.130.925,00
5.1.1	Belanja Pegawai	182.135.126.225,00
5.1.2	Belanja Hibah	50.889.648.600,00
5.1.3	Belanja Bantuan Sosial	190.350.000,00
5.1.4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	136.769.743.400,00
5.1.5	Belanja Tidak Terduga	23.226.262.700,00
5.1.6	Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Bidang Keagamaan	00,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	323.162.528.367,00
2.2.1	Belanja Pegawai	5.340.945.500,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159.018.672.561,00
2.2.3	Belanja Modal	158.802.910.306,00

Tabel 3.7 Proyeksi Belanja Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022

NO.	BELANJA	TAHUN BERJALAN 2021	PROYEKSI 2022
5	BELANJA		
5.1	BELANJA OPERASI	403.149.968.795	403.149.968.795
5.1.01	Belanja Pegawai	208.004.543.010	208.004.543.010
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.866.010.585	188.866.010.585
5.1.05	Belanja Hibah	4.929.415.200	4.929.415.200
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.350.000.000	1.350.000.000
5.2	BELANJA MODAL	186.214.718.063	186.214.718.063
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.158.120.000	3.158.120.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.620.376.780	32.620.376.780
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.219.758.727	43.219.758.727
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	106.351.462.556	106.351.462.556
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	865.000.000	865.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000	3.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	139.271.795.500	139.271.795.500
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	139.271.795.500	139.271.795.500
	Jumlah Belanja	731.636.482.358	731.636.482.358

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka pelaksanaan Program dan kegiatan Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tahun 2022 adalah tahun pertama RPJMD Kabupaten Kolaka Timur periode 2021 -2026 dimana pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dipimpin oleh kepala daerah yang baru. Memasuki tahun pertama pelaksanaan RPJMD tentu ada kebijakan pemerintah dalam menghadapi dampak dari pandemik Covic-19, menjaga daya beli masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur serta pemulihan ekonomi. Salah satu cara yakni dengan mengalokasikan porsi belanja modal dan belanja barang jasa untuk perbaikan fungsi maupun pembangunan sarana prasarana infrastruktur, memberi lapangan pekerjaan baru, serta memudahkan akses masyarakat atas pemenuhan kebutuhan dasar sandang pangan papan.
- b. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus berbasis kinerja. Oleh karena itu, dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan keluaran (output), hasil (outcomes) yang dihasilkan dari satu kegiatan;
- c. Terhadap program dan/atau kegiatan pembangunan yang direncanakan harus diuraikan dengan secara jelas, terukur, akurat, dan dapat dicapai, mulai dari masukan (input), keluaran hingga hasil.

- d. Prospek pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 menjadi salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 untuk menstabilkan daya beli masyarakat serta mendorong produksi pertanian lebih maksimal, yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat Kabupaten Kolaka Timur.

Perencanaan belanja daerah baik belanja Operasi, belanja Modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer dalam APBD tahun 2022 patut memprioritaskan hal-hal yang bersifat efektif, efisien serta transparan dan akuntabel. Kebijakan belanja daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang prioritas yakni terkait penyiapan sarana dan prasarana pemerintah, serta dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan mendorong sektor-sektor yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian daerah di Kabupaten Kolaka Timur.

Dukungan terhadap sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kolaka Timur tidak harus langsung bersentuhan dengan belanja yang hanya berada dalam program dan kegiatan urusan bidang pertanian tetapi juga belanja pada urusan lain yang akan memberi efek positif atau multiplier effect pada semua sektor misal: pembangunan infra struktur dasar, kemudahan akses kesehatan pendidikan dan pelayanan publik.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan dihitung dengan memasukkan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 44.023.053.836,44

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kolaka Timur

No	Jenis Penerimaan dan Pembiayaan Daerah	Tahun			
		Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Proyeksi/Target Pada Tahun Berjalan 2021	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana 2022`
1	2	4	5	6	7
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	33.694.329.669,62	44.023.053.836,44	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	JUMLAH	33.694.329.669,62	44.023.053.836,44	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00

	PENERIMAN PEMBIAYAAN				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	3.960.189.800,00	2.457.607.955,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.960.189.800,00	2.457.607.955,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	29.734.189.869,62	41.565.445.881,44	3.500.000.000	3.500.000.000

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kab. Kolaka Timur yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKPD merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel yang berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Kolaka Timur tahun lalu, proyeksi pencapaian kinerja tahun 2021, rancangan program indikatif di tahun 2022 dari RPJMD Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021-2026, tentang telaah tujuan dan tahapan pembangunan Kabupaten Kolaka Timur, telaah arahan strategis pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023, telaah prioritas RPJMN 2020-2024 serta isu-isu kebijakan nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, dokumen RKPD 2022 Kabupaten Kolaka Timur disusun dengan tema ***“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Unggulan Dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar”***. Untuk itu dalam bab ini akan dibahas mengenai penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan sebagai dasar penetapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2022

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang dianalisis berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Kepala Daerah terpilih berkewajiban merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan dan percepatan pembangunan daerah yang telah dicapai sebelumnya langkah-langkah ini dijabarkan kedalam sebuah visi, misi melalui arahan kebijakan, dan rencana strategis serta program-program pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk Kabupaten Kolaka Timur yang telah terpilih dan dilantik Kepala Daerahnya dalam periode tahun 2021– 2026

Pembangunan diarahkan untuk memperkuat ketahanan, penanganan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covi19. Beberapa sasaran asumsi indikator yang menjadi target daerah yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan didaerah adalah ekonomi makro. Angka makro tersebut meliputi Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Perkapita Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, seperti pada table dibawah ini yang menggambarkan perekonomian makro Kolaka Timur dari tahun 2016 – 2019 ;

Tabel 4-1 Indikator Pembangunan Kolaka Timur
Tahun 2016 - 2019

INDIKATOR MAKRO	2016	2017	2018	2019
Produk Domestik Regional Bruto	2.800.746,39	2.943.932,79	3.123.592,25	3.296.772,18
Pengeluaran Perkapita Penduduk	7.283.000	7.499.000	9.050.000	
Indek Pembangunan Manusia	63,6	64,55	65,53	66,49
Angka Kemiskinan	15,71	15,64	13,82	13,71
Pertumbuhan Ekonomi	7,4	5,11	6,10	5,63

Sejalan dengan sasaran dan target Nasional serta sasaran dan target Provinsi Sulawesi Tenggara maka sasaran dan target pembangunan Kabupaten Kolaka Timur dalam RKPD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 sesuai target RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,72 persen.
2. Tingkat kemiskinan pada kisaran 13,40 persen;
3. IPM menjadi 66,60
4. Target pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka berkisar 3.15 persen.
5. Gini Ratio 0,3601

Kondisi ekonomi global ke depan diperkirakan masih belum kondusif pertumbuhan ekonomi global 2021 dan 2022 diproyeksikan tumbuh terbatas perekonomian global masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian salah satu yang masih berdampak besar terutama yang berasal dari penyebaran Corona virus-19

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 disusun secara realistis dan obyektif dengan mempertimbangkan potensi, isu permasalahan, hasil analisis dan evaluasi, capaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, maka tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2022 masih mengacu pada tujuan dan sasaran pokok RPJMD.

RKPD Tahun 2022 juga memperhatikan kondisi saat ini dan kebutuhan masyarakat berdasarkan usulan dalam musrenbang kabupaten serta Misi Bupati Kolaka Timur terpilih. Adapun Misi yang ingin dicapai pada pemerintahan saat ini adalah sebagai berikut ;

- Misi pertama,** Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Serta Budaya Lokal;
- Misi Kedua,** Peningkatan Aksebilitas, Pemerataan Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- Misi Ketiga,** Percepatan Kualitas Infrastruktur Publik Yang Memadai Dan Efektif;
- Misi Keempat,** Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Transparan Melayani Masyarakat;
- Misi Kelima,** Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Penguatan, Umkm, Koperasi Dan Pelaku Usaha;
- Misi Keenam,** Penguatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat;
- Misi Ketujuh,** Pembinaan Dan Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga Dan Seni Budaya;

Misi Delapan, Mengembangkan Potensi Wisata;

Misi Sembilan, Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Damai Dan Tertib;

Misi Sepuluh, Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Profesional, Selaras, Serasi Dan Seimbang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam kerangka tersebut. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mengupayakan sinergi stakeholder serta semua pemangku kepentingan pembangunan, antara lain pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Adapun tujuan dan sasaran pokok RPJMD (2021-2026) Kabupaten Kolaka Timur disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4-2 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Serta Budaya Lokal	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing	Meningkatnya mutu pendidikan, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal.
2	Peningkatan Aksesibilitas, Pemerataan Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.	Tercapainya Pemerataan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
3	Percepatan Kualitas Infrastruktur Publik Yang Memadai Dan Efektif	Mewujudkan Infrastruktur Publik Yang Berkualitas	Meningkatnya Infastruktur Jalan
			Meningkatnya Pembangunan Infastruktur Dasar
4	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Transparan Melayani Masyarakat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Berbasis Spm
5	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Penguatan Umkm, Koperasi Dan Pelaku Usaha	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Daya Saing Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Pendapatan Masyarakat

			Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian
6	Penguatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Meningkatnya Solidaritas, Toleransi Dan Kesejahteraan Masyarakat
7	Pembinaan Dan Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga Dan Seni Budaya	Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pemuda Berprestasi Di Bidang Olahraga Dan Seni Budaya
8	Mengembangkan Potensi Wisata	Mengembangkan Potensi Wisata Unggulan Daerah	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata Daerah Melalui Atraksi, Amenitas Dan Aksesibilitas
9	Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Damai Dan Tertib	Mewujudkan Kerukunan Antar Umat Beragama Dan Hubungan Sosial Kemasyarakatan	Terciptanya Hubungan Yang Harmonis Antar Umat Beragama Dan Kelompok Sosial
10	Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Profesional, Selaras, Serasi Dan Seimbang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan lingkungan hidup lestari dan berkelanjutan.	Terkendalinya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kabupaten Kolaka Timur sampai dengan tahun 2026 dikelompokkan sesuai dengan Misi sebagai berikut :

Misi 1

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Serta Budaya Lokal;

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, dengan sasaran pada :

a. Pembinaan keagamaan

1. Meningkatkan kapasitas pemahaman dan pengamalan ajaran Agama.
2. Meningkatkan peran Lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan.
3. Bantuan Pembangunan sarana rumah Ibadah dan Ormas keagamaan
4. Tersedianya Honorarium Imam dan Pembina TPQ

b. Pendidikan

1. Meningkatkan kompetensi, Profesionalisme dan Kesejahteraan Guru.
2. Jaminan penuntasan pendidikan wajib belajar 12 tahun.
3. Meningkatkan kemampuan siswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
4. Beasiswa bagi Siswa kurang mampu yang berprestasi
5. Menanamkan dan membumikan nilai-nilai budi pekerti melalui muatan lokal mata pelajaran “budi pekerti”

MISI 2

Peningkatan Aksesibilitas, Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, dengan sasaran pada :

1. Meningkatkan kesehatan bagi Ibu dan anak.
2. Meningkatkan Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga medis
5. Membangun Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

MISI 3

Percepatan Kualitas Infrastruktur Publik Yang Memadai dan Efektif;

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, dengan sasaran pada :

1. Pembangunan jalan dan jembatan untuk memudahkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kolaka Timur dari pelosok hingga ke ibu kota Kabupaten serta Pembangunan Irigasi.
2. Tersedianya pemenuhan Air Bersih Masyarakat
3. Pembangunan infrastruktur pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta meningkatkan kualitas produksinya.
4. Penataan kawasan ibu kota Kabupaten Kolaka Timur.

MISI 4

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Transparan Melayani Masyarakat;

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dengan sasaran pada :

1. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.
2. Penataan Standar Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Profesionalitas Birokrasi yang transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN)
4. Menetapkan Fakta Integritas bebas Pungli dan KKN.
5. Mutasi dan Promosi Jabatan Berbasis Kinerja, asas Keadilan dan manfaat.

MISI 5

Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Penguatan UMKM, Koperasi dan Pelaku Usaha;

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing perekonomian daerah, dengan sasaran pada :

1. Penguatan kapasitas penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya dan dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat.
2. Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani
3. Meningkatkan dan mengembangkan Industri kecil menengah dan Koperasi

4. Mendorong iklim investasi dan kemitraan usaha yang kondusif dengan cara memudahkan perijinan dan mempersingkat jalur birokrasi serta menghilangkan praktek pungutan liar (pungli) dalam proses perijinan usaha kecil, menengah maupun besar.
5. Promosi produk unggulan daerah
6. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi masyarakat, utamanya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

MISI 6

Penguatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat;

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dengan sasaran pada :

1. Bantuan Stimulus Pembangunan di tiap Desa pertahun
2. Peningkatan Tunjangan Kades, Perangkat Desa dan BPD
3. Menjadikan Desa lebih Berdaya dan Otonom

MISI 7

Pembinaan dan Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga Dan Seni Budaya;

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan peningkatan partisipasi dalam pembangunan daerah, dengan sasaran pada :

1. Meningkatkan peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dengan penyediaan dana pembinaan generasi muda

2. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai
3. Pembinaan Atlet berprestasi
4. Mendorong kreatifitas seni budaya, menghidupkan dan melestarikan adat budaya dan kearifan lokal

MISI 8

Mengembangkan Potensi Wisata;

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan pengembangan potensi wisata unggulan daerah, dengan sasaran pada :

1. Meningkatkan akses infrastruktur pariwisata
2. Mengembangkan destinasi wisata
3. Meningkatkan manajemen dan pengelolaan wisata dengan melibatkan masyarakat

MISI 9

Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Damai Dan Tertib;

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan hubungan sosial kemasyarakatan, dengan sasaran pada :

1. Mengembangkan Toleransi Kehidupan Umat Beragama melalui Dialog
2. Menciptakan semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat, untuk menghilangkan sekat-sekat antar suku, agama, ras dan golongan.
3. Memperkuat Lembaga keagamaan dan kebudayaan sebagai bagian dari perekat keanekaragaman masyarakat guna membentengi masyarakat dari upaya-upaya provokasi yang mengarah pada konflik antar masyarakat.

4. Meningkatkan Proses Pembangunan Khusus di Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), yang lebih Religius, dengan memberikan Insentif bagi Tokoh Agama yang ada di Kolaka Timur seperti Imam Mesjid, Pendeta, Sulinggih, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Tenaga Pengajar Pesraman dan Bhikkhu.
5. Mewujudkan penegakkan hukum, memperkuat peran pemberdayaan gender, perlindungan anak untuk terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan.

MISI 10

Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Profesional, Selaras, Serasi dan Seimbang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;

Tujuan yang ingin dicapai yaitu mewujudkan lingkungan hidup lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran pada :

1. Meningkatkan peran masyarakat dan seluruh elemen-elemen terkait dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup sehingga kesadaran hukum masyarakat bisa tercapai.
2. Pemilihan fungsi lingkungan hidup melalui upaya Konservasi dan Rehabilitasi.
3. Meminimalisir / mengendalikan dampak pembangunan pada kelestarian fungsi lingkungan hidup.

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan dan isu strategis sehingga diperlukan prioritas pembangunan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kolaka Timur periode tahun 2021-2026 dan Prioritas Pembangunan Nasional serta Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan sasaran pembangunan nasional tahun 2022, Pemerintah Pusat akan melanjutkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional pada tahun 2021, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi Pelayanan Publik

Selain berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2022, RKPD Kabupaten Kolaka Timur juga mengacu pada Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar;
- 2) Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan;
- 3) Tata kelolah pemerintahan yang baik;
- 4) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah untuk mendukung konektifitas;

Prioritas pembangunan Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2022 merupakan strategi yang ditempuh untuk mempercepat tercapainya sasaran pokok pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021-2026. Penetapan Prioritas pembangunan 2022 dilakukan dengan memperhatikan prioritas nasional, prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara, isu/permasalahan daerah dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kolaka Timur tahun sebelumnya.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka prioritas pembangunan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan Dan Pengentasan Kemiskinan
2. Percepatan Pembangunan Dan Pemerataan Infastruktur
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Sektor Pertanian, Pariwisata Dan Kesempatan Kerja.
4. Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pengembangan Budaya Dan Tata Kelola Pemerintahan

Guna mencapai target prioritas pembangunan kabupaten Kolaka Timur tahun 2022, diperlukan program pembangunan yang terarah dan telah tertuang dalam RPJMD kabupaten kolaka timur tahun 2021-2026. Adapun program yang mendukung untuk mencapai prioritas tersebut yaitu ;

1. Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan Dan Pengentasan Kemiskinan

Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan indikator makro pembangunan tahun 2022 yang meliputi peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan mutu pelayanan dasar dan pemerataan pelayanan dasar.

Program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan pembangunan Kabupaten Kolaka Timur dari segi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan;
- b. Program Pengembangan Kurikulum;
- c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- e. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- g. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Peningkatan derajat kesehatan melalui peningkatan umur harapan hidup, penurunan stunting, penurunan

kematian ibu dan bayi, peningkatan gizi masyarakat serta pengentasan kemiskinan yaitu :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- e. Program Pengendalian Penduduk;
- f. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
- g. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
- h. Program Pemberdayaan Sosial;
- i. Program Rehabilitasi Sosial;
- j. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- k. Program Penanganan Bencana;

2. Percepatan Pembangunan Dan Pemerataan Infastruktur

Untuk mendukung kebijakan percepatan pembangunan dan pemerataan infastruktur, beberapa program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur adalah :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda;)
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
- e. Program Pengembangan Permukiman;
- f. Program Penataan Bangunan Gedung;

- g. Program Penyelenggaraan Jalan;
- h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- i. Program Pengembangan Perumahan;
- j. Program Kawasan Permukiman;
- k. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu);
- l. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj);

3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Sektor Pertanian, Pariwisata Dan Kesempatan Kerja

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung visi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan, selain itu kebijakan ini dimaksudkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dalam hal penanganan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 secara umum dan secara luas melalui sebuah proses yang menghasilkan perubahan sosial baik nilai, norma, prilaku juga guna meningkatkan pangsa pasar secara menguntungkan dan berkelanjutan melalui pemanfaatan keunggulan komparatif Kabupaten Kolaka Timur.

Program pembangunan yang akan dilaksanakan ditujukan pada beberapa hal sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
- b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
- e. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;

- f. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- g. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- h. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- i. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- j. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- k. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- l. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- m. Program Penyuluhan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian;
- n. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- o. Program Pemasaran Pariwisata;
- p. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
- q. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- r. Program Penempatan Tenaga Kerja;
- s. Program Hubungan Industrial;
- t. Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
- u. Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- v. Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- w. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
- x. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM);
- y. Program Pengembangan UMKM;

4. Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pengembangan Budaya Dan Tata Kelola Pemerintahan

Kebijakan ini dimaksudkan untuk upaya memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang meliputi upaya dalam pengelolaan lingkungan hidup, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, pengendalian dan untuk mencapai ketahanan sumber daya air dan tanah yang berkelanjutan serta perbaikan lingkungan. Selain itu kebijakan dalam hal peningkatan pelestarian seni budaya dimaksudkan untuk melestarikan nilai – nilai budaya lokal, dan terpeliharanya nilai-nilai adat istiadat di tengah-tengah masyarakat. Untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan pelayanan publik yang prima, melaksanakan e-government yang terintegrasi (e-planning, e-budgeting, e-monitoring dan e-evaluating) serta meningkatkan efektivitas dan pencegahan tindak pidana korupsi, menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta aparatur pemerintahan berkarakter yang mempunyai nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi sebagai pengemban amanah yang professional yang berdaya guna sehingga dapat menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Program pembangunan yang akan dilaksanakan ditujukan pada beberapa hal sebagai berikut ;

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);

- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- h. Program Pengelolaan Persampahan;
- i. Program Pengembangan Kebudayaan;
- j. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- k. Program Administrasi Umum;
- l. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
- m. Program Perekonomian Dan Pembangunan;
- n. Program Kepegawaian Daerah;
- o. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
- p. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- q. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- r. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- s. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- t. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- u. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- w. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- x. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
- y. Program Pendaftaran Penduduk;
- z. Program Pencatatan Sipil;

- aa. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- bb. Program Penataan Desa;
- cc. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- dd. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- ee. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat;

Selain program pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut diatas, beberapa hal yang penting dilaksanakan antara lain :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Pelaksanaan E-Government (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian) dalam pengelolaan pemerintahan daerah;
- c. Peningkatan profesionalitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan pemantapan pencapaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Standard Operating Procedure (SOP)/Prosedur Operasi Standar;
- d. Pengembangan kerjasama pengelolaan asset daerah dengan pihak ketiga atau kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kolaka timur tahun 2016-2021, RKPD Tahun 2022 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi.

Tabel 4.3
Indikator Pembangunan Tahun 2020

SASARAN MAKRO EKONOMI	NASIONAL	PROV.SULTRA	KAB. KOLTIM
Pertumbuhan Ekonomi	-2,70 %	-0,65%	-0,31 %
Indeks Pembangunan Manusia	71,94	71,45	
Persentase Penduduk Miskin	10,19 %	11,69 %	13,47
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,07 %	4,58 %	
Gini Rasio	0,385	0,388	

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Kolaka Timur. Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan dan rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Kolaka Timur dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan, kebijakan pemerintah dalam skala Nasional dan regional serta hasil Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrebang) tahun perencanaan 2022 yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Urusan dan Program Tahun 2022

No	URUSAN	PROGRAM
A	URUSAN WAJIB	
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan. (Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga)	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Pengelolaan Pendidikan 3) Program Pengembangan Kurikulum 4) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 5) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
	2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan. (Dinas Kesehatan)	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
	3) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan. (Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD))	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	4) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

	<p>Umum dan Penataan Ruang.</p> <p>(Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2) Program Penyelenggaraan Jalan 3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 4) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 5) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 6) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 7) Program Pengembangan Permukiman 8) Program Penataan Bangunan Gedung 9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	<p>5) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Pengembangan Perumahan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3) Program Kawasan Permukiman Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Program Lingkungan Sehat Perumahan
	<p>6) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Penanggulangan Bencana 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	<p>7) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. (Satuan Polisi Pamong Praja)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	<p>8) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial. (Dinas Sosial)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Pemberdayaan Sosial 3) Program Rehabilitasi Sosial

		<ul style="list-style-type: none"> 4) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 5) Program Penanganan Bencana
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi. (Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 3) Program Penempatan Tenaga Kerja 4) Program Hubungan Industrial
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 3) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 4) Program Pemenuhan Hak Anak 5) Program Perlindungan Khusus Anak 6) Program Perlindungan Hak Perempuan
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan (Dinas Pangan) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 3) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 4) Program Penanganan Kerawanan Pangan 5) Program Pengawasan Keamanan Pangan
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan (Sekretariat Daerah) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

	<p>5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. (Dinas Lingkungan Hidup)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup 3) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 6) Program Pembinaan Dan Pengawasan 7) Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) 8) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 10) Program Pengelolaan Persampahan
	<p>6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. (Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Pendaftaran Penduduk 3) Program Pencatatan Sipil 4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
	<p>7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Penataan Desa 3) Program Peningkatan Kerja Sama Desa 4) Program Administrasi Pemerintahan Desa 5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	<p>8. Urusan Pemerintahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan

	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Pengendalian Penduduk 3) Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 4) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan. (Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan)	1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika. (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah. (Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM)	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi 4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen 7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 8) Program Pengembangan UMKM
	12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal. (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 3) Program Promosi Penanaman Modal 4) Program Pelayanan Penanaman Modal 5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

		6) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga. (Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga)	1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	14. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian)	1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
	15. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan. (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	1) Program Pengembangan Kebudayaan 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional 3) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
	16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan. (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan)	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Pembinaan Perpustakaan
	17. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan. (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan)	1) Program Pengelolaan Arsip 2) Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 3) Program Perizinan Penggunaan Arsip
C	URUSAN PILIHAN	
	1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan. (Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan)	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata. (Dinas Pariwisata dan	1) Program Penigkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2) Program Pemasaran Pariwisata

	Kebudayaan)	3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian. (Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 5) Program Penyuluhan Pertanian
	4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian. (Dinas Perkebunan dan Hortikultura)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 3) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 4) Program Penyuluhan Pertanian
	5. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan. (Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 4) Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen
	6. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian. (Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
	7. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi. (Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan Kawasan Transmigrasi 2) Pembangunan Kawasan Transmigrasi 3) Pengembangan Kawasan Transmigrasi

D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
	1) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. (Sekretariat Daeah)	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Administrasi Umum 3) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 4) Program Perekonomian Dan Pembangunan
	2) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. (Sekretariat DPRD)	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
	3) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Perencanaan (Bappeda Litbang)	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	4) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Keuangan (BKPPD)	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	5) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Kepegawaian (BKPSDM)	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Kepegawaian Daerah
	6) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. (Penelitian Pengembangan)	1) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	7) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan. (Inspektorat Daerah)	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan

		3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi
	8) Unsur Kewilayahan. (Kecamatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	9) Unsur Kewilayahan. (Kelurahan)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	10) Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa Dan Politik)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 3) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 4) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 5) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Pada tahun anggaran 2022 diproyeksikan total belanja langsung sebesar Rp. 582.047.315.588,00,- yang pembiayaannya bersumber dari DAU / DBH / PAD / DAK.

Berikut table Rencana Pagu Belanja Langsung Per OPD Tahun 2022.

Tabel 5.2
Rencana Pagu Indikatif Belanja Langsung
Per OPD Tahun 2022

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	192.877.950.000,00
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	192.877.950.000,00
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	69.087.346.000,00
Dinas Kesehatan	49.275.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur	19.812.346.000,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	81.050.697.800,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan	81.050.697.800,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	9.940.796.500,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.940.796.500,00
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	11.338.460.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	6.244.460.000,00
Badan Penanggulangan Bencana	5.094.000.000,00

Daerah	
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	4.300.000.000,00
Dinas Sosial	4.300.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	5.889.808.000,00
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5.889.808.000,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.587.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.587.000.000,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	4.150.500.000,00
Dinas Pangan	4.150.500.000,00
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	7.750.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	7.750.000.000,00
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.293.600.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.293.600.000,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.912.429.086,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.912.429.086,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	10.412.574.544,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.412.574.544,00
Urusan Pemerintahan Bidang	6.667.000.000,00

Komunikasi Dan Informatika	
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	6.667.000,000,00
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	40.022.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.022.000.000,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	20.336.716.228,00
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	20.336.716.228,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	12.825.000.000,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12.825.000.000,00
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	41.838.603.000,00
Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan	24.909.000,000,00
Dinas Perkebunan dan Holtikultura	16.829.603,000,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	10.443.293.293,00
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.443.293.293,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
Sekretariat Daerah	34.908.316.700,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	27.500.000.000,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
Perencanaan	5.780.000.000,00
Bappeda Litbang	5.780.000.000,00

Keuangan	153.780.000.000,00
BPKPD	153.780.000.000,00
Kepegawaian	3.881.710.000,00
BKPSDM	3.881.710.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
Inspektorat Daerah	10.803.000.000,00
Inspektorat	10.803.000.000,00
UNSUR KEWILAYAHAN	
Kecamatan ;	
Kecamatan Tirawuta	3.157.850.000,00
Kecamatan Loea	2.169.407.611,00
Kecamatan Ladongi	3.218.924.000,00
Kecamatan Poli-polia	1.473.065.702,00
Kecamatan Lambandia	1.699.072.010,00
Kecamatan Lalolae	1.857.000.000,00
Kecamatan Tinondo	1.489.264.883,00
Kecamatan Mowewe	2.365.761.134,00
Kecamatan Uluiwoi	1.847.844.519,00
Kecamatan Aere	1.050.000.000,00
Kecamatan Dangia	1.211.409.389,00
Kecamatan Uesi	1.249.999.200,00
Kelurahan ;	
Kelurahan Poli-polia	250.000.000,00
Kelurahan Tinengi	219.650.000,00
Kelurahan Tababu	240.000.000,00
Kelurahan Inebengi	220.000.000,00
Kelurahan Sanggona	220.000.000,00
Kelurahan Loea	185.648.900,00
Kelurahan Lalolae	220.000.000,00
Kelurahan Ra-raa	240.000.000,00
Kelurahan Ladongi Jaya	240.000.000,00
Kelurahan Rate-rate	250.000.000,00
Kelurahan Simbalai	220.000.000,00
Kelurahan Atula	240.000.000,00
Kelurahan Penanggo Jaya	220.000.000,00
Kelurahan welala	240.000.000,00

Kelurahan Woitombo	230.000.000,00
Kelurahan Horodopi	260.464.100,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.795.915.200,00
Bapolpum	6.795.915.200,00

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam RKPD Tahun 2022, adalah sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut;

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tolok ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian kinerja tahunan Kepala Daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) menjadi dasar bagi Organisasi Pemerintah Daerah dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik termuat dalam RKPD maupun dalam Renja PD. Indikator kinerja tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan 2021-2026**

NO	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR								
1	PENDIDIKAN								
1.1	TINGKAT PARTISIPASI PAUD 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PAUD	PERSEN	92,23	100	100	100	100	100	100
1.2	TINGKAT PARTISIPASI SD 7-12 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN DASAR	PERSEN	92,43	100	100	100	100	100	100
1.3	TINGKAT PATISIPASI SMP 13-15 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA	PERSEN	84,43	100	100	100	100	100	100
1.4	TINGKAT PASTISIPASI USIA 7-18 TAHUN YANG BELUM MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN KESETARAAN	PERSEN	84,83	86	88	90	92	94	94
2	KESEHATAN								
2.1	RASIO DAYA TAMPUNG RS TERHADAP JUMLAH PENDUDUK	PERSEN	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07

2.2	PERSENTASE RS RUJUKAN YANG TERAKREDITASI	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
2.3	PERSENTASE IBU HAMIL MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
2.4	PERSENTASE IBU BERSALIN MENDAPATKAN PELAYANAN IBU BERSALIN	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
2.5	PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPATKAN PELAYANAN BAYI BARU LAHIR	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
2.6	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA SESUAI STANDAR	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
2.7	PERSENTASE ANAK USIA PENDIDIKAN DASAR YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
2.8	PERSENTASE ORANG USIA 15-29 TAHUN MENDAPATKAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
2.9	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA 60 TAHUN KEATAS MENDAPATKAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
2.10	PERSENTASE PENDERITA HIPERTENSI YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
2.11	PERSENTASE PENDERITA DM YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
2.12	PERSENTASE ODGJ BERAT YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA SESUAI STANDAR	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
2.13	PERSENTASE ORANG TERDUGA TBC MENDAPATKAN PELAYANAN TABC SESUAI STANDAR	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
2.14	PERSENTASE ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI HIV MENDAPATKAN PELAYANAN DETEKSI DINI HIV SESUAI STANDAR	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
3.1	RASIO LUAS KAWASAN PERMUKIMAN RAWAN BANJIR YANG TERLINDUNGI OLEH INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DI WS KEWENANGAN KAB/KOTA	PERSEN	0%	10%	12%	14%	16%	18%	18%

3.2	RASIO LUAS KAWASAN PERMUKIMAN SEPANJANG PANTAI RAWAN ABRASI, EROSI, DAN AKRESI YANG TERLINDUNGI OLEH INFRASTRUKTUR PENGAMAN PANTAI DI WS KEWENANGAN KAB/KOTA	PERSEN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.3	RASIO LUAS DAERAH IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YANG DILAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI	PERSEN	92.06%	92.20%	92.34%	92.48%	92.62%	92.76%	92.76%
3.4	PERSENTASE JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AKSES TERHADAP AIR MINUM MELALUI SPAM JARINGAN PERPIPAAN DAN BUKAN JARINGAN PERPIPAAN TERLINDUNGI TERHADAP RUMAH TANGGA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA	PERSEN	7.04%	8.50%	9.96%	11.42%	12.88%	14.34%	14.34%
3.5	PERSENTASE JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	PERSEN	2.92%	5.00%	7.08%	9.16%	11.24%	13.32%	13.32%
3.6	RASIO KEPATUHAN IMB KAB/KOTA	PERSEN	96.00%	96.00%	96.00%	96.00%	96.00%	96.00%	96.00%
3.7	TINGKAT KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN/KOTA	KM	36.97	39.87	42.77	45.67	48.57	51.47	51.47
3.8	RASIO TENAGA OPERATOR/TEKNIISI/ANALISIS YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI	PERSEN	0.00%	4.00%	8.00%	12.00%	16.00%	20.00%	20.00%
3.9	RASIO PROYEK YANG MENJADI KEWENANGAN PENGAWASAN TANPA KECELAKAAN KONSTRUKSI	PERSEN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	PERUMAHAN RAKYAT								
4.1	PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	KK	0	5	5	5	5	5	25
4.2	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK RELOKASI PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	KK	0	5	5	5	5	5	25
4.3	PERENTASE KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DIBAWAH 10 Ha DI KABUPATEN/KOTA YANG DITANGANI	%	0	5	5	5	5	5	25
4.4	BERKURANGNYA JUMLAH UNIT RTLH [RUMAH TIDAK LAYAK HUNI]	KK	2295	2285	2275	2265	2255	2245	2245

4.5	JUMLAH PERUMAHAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU [PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM]	UNIT	0	5	5	5	5	5	25
5	KETENTERANGAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
5.1	PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	PERSEN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	PERSENTASE PERDA DAN PERKADA YANG DITEGAKKAN	PERSEN	11.76%	15%	20%	25%	30%	35%	35%
5.3	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
5.4	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
5.5	JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
5.6	PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
5.7	WAKTU TANGGAP {RESPON TIME} PENANGANAN KEBAKARAN	MENIT	34.4	32	28	25	20	18	18
6	SOSIAL								
6.1	PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI [INDIKATOR SPM]	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
6.2	PERSENTAS KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR									
1	TENAGA KERJA								

1.1	PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA	PERSEN	83.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1.2	PERESENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	PERSEN	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
1.3	TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	ORANG	271	305	305	305	305	305	1525
1.4	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK {PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH, DAN TERDAFTAR PESERTA BPJS KETANAGAKERJAAN}	PERSEN	21.97	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73
1.5	PERSENTAS TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN {DALAM DAN LUAR NEGERI} MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA	PERSEN	58.89	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.1	PERSETASE ARG PADA BELANJA LANGSUNG APBD	PERSEN	0.26	10	15	20	25	30	30
2.2	PERSEN RASE ANAK KORBAN KEKERASAN YANG DITANGANI INSTANSI TERKAIT KABUPATEN	PERSEN	0.002	0.01	0.014	0.016	0.018	0.2	0.2
2.3	RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, TERMASUK TPPO {PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN}	PERSEN	4.95	4.9	4.84	4.8	4.75	4.7	4.7
3	PANGAN								
3.1	PERSENTASE KETERSEDIAAN PANGAN {TERSEDIAANYA CADANGAN BERAS/ JAGUNG SESUAI KEBUTUHAN}	PERSEN	92.18	94.79	96.09	97.39	98.7	100	100
4	PERTANAHAN								
4.1	PERSENTASE PEMANFAATAN TANAH YANG SESUAI DENGAN PERUNTUKAN TANAHNYA DIATAS IZIN LOKASI DIBANDINGKAN DENGAN LUAS IZIN LOKASI YANG DITERBITKAN	PERSEN	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
4.2	PERSENTASE PENETAPAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM	PERSEN	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%

4.3	TERSEDIAANYA LOKASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL	PERSEN	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
4.4	TERSEDIAANYA TANAH PBYEK LANDREFORM {TOL} YANG SIAP DISEDISTRIBUSIKAN YANG BERASAL DARI TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	PERSEN	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
4.5	TERSEDIAANYA TANAH UNTUK MASYARAKAT	PERSEN	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
4.6	PENANGAN SENGKETA TANAH GARAPAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIASI	PERSEN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	LINGKUNGAN HIDUP								
5.1	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP {IKLH} KAB/KOTA	INDEKS	58,3	68,35	70,10	72,30	73,20	74,10	74,10
5.2	TERLAKSANANYA PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KAB/KOTA	PERSEN	0.32%	2%	4%	6%	8%	10%	10%
5.3	KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	PERSEN	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
6.1	PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK	JIWA	81062	83162	83162	83162	90000	92280	92280
6.2	PERSENTASE ANAK USIA 01-7 TAHUN KURANG 1 {SATU} HARI YANG MEMILIKI KIA	PERSEN	19.28	25	35	45	55	65	65
6.3	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	JIWA	34878	36278	37778	39378	41078	42878	42878
6.4	JUMLAH OPD YANG TELAH MEMANFAATKAN DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA KIA	OPD	0	2	2	2	2	2	10
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								

7.1	PERSENTASE PENGENTASAN DESA TERTINGGAL	PERSEN	46.15%	40.99%	34.02%	26.34%	17.18%	2.56%	2.56%
7.2	PERSENTASE PENIGNKATAN STATUS DESA MANDIRI	PERSEN	0%	0.85%	1.71%	2.56%	3.42%	4.27%	4.27%
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
8.1	TFR {ANGKA KELAHIRAN TOTAL}	PERSEN	2.34	2.32	2.3	2.28	2.26	2.24	2.24
8.2	PERSENTASE PEMAKAIAAN KONTRASEPSI MODERN {MODERN CONTRACEPTIVE PREWALENCE RATE,MCPR}	PERSEN	16	16.5	17	17.5	18	18.5	18.5
8.3	PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI {UNMET MEED}	PERSEN	14.11	14	13.5	13	12.5	11	11
9	PERHUBUNGAN								
9.1	RASIO KONEKTIVITAS KABUPATEN/KOTA	PERSEN	28.75	29.80	30.85	31.90	32.95	34.00	34.00
9.2	KINERJA LALU LINTAS KABUPATEN/KOTA	PERSEN	0.00%	2.00%	2.20%	2.40%	2.60%	2.80%	2.80%
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
10.1	PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH {OPD} YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMINFO	PERSEN	96.4%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
10.2	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	PERSEN	20%	30%	40%	50%	60%	70%	70%
10.3	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSEN	58.42%	58.42%	60%	62.50%	65%	68%	68%
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								

11.1	MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS	PERSEN	1.86	2.60	2.79	2.98	3.16	3.35	3.35
11.2	MENINGKATNYA USAHA MIKRO YANG MENJADI WIRUSAHA	PERSEN	1.11	1.55	1.67	1.78	1.89	2.00	2.00
12	PENANAMAN MODAL								
12.1	PERSENTASE PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN/KOTA	Rp	213,886,157,211	267,357,696,514	334,197,120,642	417,746,400,803	522,183,001,003	652,728,751,254	2,194,212,970,216
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
13.1	TINGKAT PERTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI	PERSEN	0,09	0,095	0,1	0,12	0,14	0,16	0,16
13.2	TINGKAT PERTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN	PERSEN	0,55%	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1
13.3	PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	JUMLAH	0	2	3	3	4	4	4
14	STATISTIK								
14.1	PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH {OPD} YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSEN	95.12	95.12	95.12	97.56	97.56	100	100
14.2	PERSENTASE OPD YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MELAKUKAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSEN	63.41	63.41	65.85	65.85	68.29	68.29	68.29
15	PERSANDIAN								
15.1	TINGKAT KECAMATAN INFORMASI PEMERINTAHAN	PERSEN	0%	20%	25%	30%	35%	40%	40%
16	KEBUDAYAAN								

16.1	TERLESTARIKANNYA CAGAR BUDAYA	CAGAR BUDAYA	6	2	2	2	2	2	16
17	PERPUSTAKAAN								
17.1	NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	PERSEN	0.00996	1	1.5	2	2.5	3	3
17.2	INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	KEARSIPAN								
18.1	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL PASAL 40 DAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN	PERSEN	25	30	35	40	45	50	50
18.2	TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA, PEMERINTAHAN PALAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSEN	0	1	2	3	4	5	5
	URUSAN PILIHAN								
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1.1	JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN (TANGKAP DAN BUDIDAYA) KABUPATEN/KOTA	TON/ TAHUN	33.95	34.7	35.5	36.5	37.5	38.5	38.5
2	PARIWISATA								
2.1	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGERA PER KEBANGSAAN	PERSEN	-28%	15%	20%	25%	30%	40%	40%
2.2	PERSENTASE PENINGKATAN PERJALANAN WISATAWAN NUSANTARA YANG DATANG KE KABUPATEN/KOTA	PERSEN	-41,44%	40%	45%	50%	55%	60%	60%
2.3	TINGKAT HUNIAN AKOMODASI	PERSEN	23,56%	30%	35%	40%	45%	50%	50%

2.4	KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU	PERSEN	0	0,25%	0,30%	0,35%	0,40%	0,50%	0,50%
2.5	KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PAD	PERSEN	0	0,25%	0,30%	0,35%	0,40%	0,50%	0,50%
3	PERTANIAN								
1.1	PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN	TON/HEKTAR	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.2	5.2
		TON/HEKTAR	0,554	4	4.2	4.5	4.8	5	5
1.2	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	PERSEN	N/A	-0.17	-0.20	-0.25	-0.42	-0.57	-0.57
4	PERDAGANGAN								
4.1	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN {IUPP/SIUP PUSAT PERBELANJAAN DAN IUTM/IUTS/SIUP TOKO SWALAYAN}	PERSEN	3	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.4
4.2	PERSENTASE KINERJA REALISASI PUPUK	PERSEN	0	40	50	60	70	80	80
4.3	PERSENTASE ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA {UTTP} BERTANDA TERA SAH YANG BERLAKU	PERSEN	48	67.2	72	76.8	81.6	86.4	86.4
5	PERINDUSTRIAN								
5.1	PERTAMBAHAN JUMLAH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI	PERSEN	0.67	0.94	1.01	1.07	1.14	1.21	1.21
5.2	PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIP	PERSEN	0	0	0	0	0	0	0
5.3	PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT	PERSEN	40	56	60	64	68	72	72

5.4	PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN PERLUASAN INDUSTRI {IPUI} KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT	PERSEN	0	40	50	60	70	80	80
5.5	PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI {IUKI} DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI {IPKI} YANG LOKASINYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSEN	0	40	50	60	70	80	80
5.6	TERSEDIAANYA INFORMASI INDUSTRI SECARA LENGKAP DAN TERKINI	PERSEN	0	40	50	60	70	80	80
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN								
1.1	RASIO BELANJA PEGAWAI DI LUAR GURU DAN TENAGA KESEHATAN	PERSEN	12	13.20	13.86	14.55	16.04	16.04	16.04
1.2	RASIO PAD	PERSEN	0.57	0.63	0.66	0.69	0.73	0.76	0.76
1.3	MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH {SPIP}	LEVEL	1	1	2	3	3	3	3
1.4	PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAHAN {APIP}	LEVEL	2	2	2	3	3	3	3
1.5	RASIO BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM {DIKIRANGI TRANSFER EXPENDITURES}	PERSEN	48.89	53.78	56.47	59.29	62.26	65.37	65.37
1.6	OPINI LAPORAN KEUANGAN	OPINI	WTP						
2	PENGADAAN								
1.1	PERSENTASE JUMLAH TOTAL PROYEK KONSTRUKSI YANG DIBAWA KE TAHUN BERIKUTNYA. YANG DITANDATANGANI PADA KUARTAL PERTAMA	PERSEN	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

1.2	PERSENTASE JUMLAH PENGADAAN YANG DILAKUKAN DENGAN METODE KOMPETITIF	PERSEN	20%	25%	30%	35%	40%	45%	45%
1.3	RASIO NILAI BELANJAYANG DILAKUKAN MELALUI PENGADAAN	PERSEN	29%	30%	31%	32%	34%	35%	35%
3	KEPEGAWAIAN								
3.1	RASIO PEGAWAI PENDIDIKAN TINGGI DAN MENENGAH/DASAR { % } PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN	PERSEN	562.13%	603.77%	651.01%	677.08%	697.84%	727.61%	727.61%
3.2	RASIO PEGAWAI FUNGSIONAL { % } PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN	PERSEN	6.34%	33.04%	40.18%	49.11%	53.57%	66.96%	66.96%
3.3	RASIO JABATAN FUNGSIONAL BERSERTIFIKAT KOMPETENSI { % } PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN	PERSEN	69%	27.03%	33.33%	54.55%	66.67%	73.33%	73.33%
4	MANAJEMEN KEUANGAN								
4.1	DEVIASI REALISASI BELANJA TERHADAP BELANJA TOTAL DALAM APBD	PERSEN	-7.55	-8.31	-8.72	-9.16	-9.61	-10.09	-10.09
4.2	DEVIASI REALISASI PAD TERHADAP ANGGARAN PAD DALAM APBD	PERSEN	-0.24	-0.26	-0.28	-0.29	-0.31	-0.32	-0.32
4.3	MANAJEMEN ASET	YA/TDK	YA						
4.4	RASIO ANGGARAN SISA TERHADAP TOTAL BELANJA DALAM APBD TAHUN SEBELUMNYA	PERSEN	6,22	6.84	7.18	7.54	7.92	8.32	8.32
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK								
5.1	INFORMASI TENTANG SUMBER DAYA YANG TERSEDIA UNTUK PELAYANAN	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100
5.2	AKSES PUBLIK TERHADAP INFORMASI KEUANGAN DAERAH	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Timur tahun 2022 merupakan Dokumen perencanaan tahunan. Dokumen ini merupakan penjabaran teknis terhadap RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan respons pemerintah yang sistematis, kongnit, antisipatif dan adaptif dalam menjawab tantangan serta dinamika pembangunan termasuk pandemi Covid-19. Tahun 2022 menjadi momentum bagi pemulihan dan reformasi struktural agar kita semua dapat lepas dari tekanan Covid-19 dan kembali bangkit melanjutkan agenda Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu kerja keras, memerlukan banyak pikiran dan perlu didukung oleh kepemimpinan yang kapabel, berkualitas, demokratis, good governance dan clean government, konsisten dan kerjasama pemangku kepentingan pelaku pembangunan serta pengawasan dan akuntabilitas publik yang baik.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD ini disusun dengan memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan kerangka pokok pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur tahun anggaran 2022 sehingga RKPD tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS tahun 2022 dan juga sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha untuk bersinergi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan dari tingkat Desa/Kel, Kecamatan, forum perangkat daerah /lintas perangkat daerah dan musrenbang ditingkat Kabupaten .

Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 ini mudah-mudahan RKPD Tahun 2022 ini bermanfaat bagi Dinas/Badan/Instansi/Unit Kerja/Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Kolaka Timur.